

# **PUTUSAN VERSTEK DALAM PERKARA PERCERAIAN**

**(Studi Analisis Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2005/Pa.Sm**

**Di Pengadilan Agama Semarang)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Studi Strata Satu (S-1)**

**Dalam Ilmu Syari'ah**



**Di susun Oleh :**

**Abdul Razak Naufal**

**NIM : 2102028**

**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2007**

Drs. H. Nur Khoirin, M. Ag  
Fakultas Syari'ah  
Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Ngaliyan, Semarang

---

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (Empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Abdul Razak Naufal

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara :

Nama : ABDUL RAZAK NAUFAL

Nim : 2102028

Judul Skripsi : PUTUSAN VERSTEK DALAM PERKARA PERCERAIAN  
(Studi Analisis Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2005/Pa.Sm Di  
Pengadilan Agama Semarang)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 8 Januari 2007

Pembimbing I

Pembimbing II

**Drs. H. Nor Khoirin, M. Ag**

**NIP. 150 254 254**

**Moh. Arifin, S. Ag., M. Hum**

**NIP. 150 279 720**

## **PENGESAHAN**

Skripsi saudara :

Nama : ABDUL RAZAK NAUFAL

Nim : 2102028

Judul Skripsi : PUTUSAN VERSTEK DALAM PERKARA PERCERAIAN  
(Studi Analisis Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2005/Pa.Sm Di  
Pengadilan Agama Semarang)

Telah memunafasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama  
Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat  
cumlaude / baik / cukup, pada tanggal :

29 Januari 2007

Dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Starata 1 (S.1) tahun  
akademik 2006 / 2007.

Semarang, 29 Januari 2007

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

**Ali Murtadho, M. Ag**  
**Nip. 150 289 379**

**Moh. Arifin, S. Ag., M. Hum**  
**Nip. 150 279 720**

Penguji I,

Penguji II,

**Drs. H. Eman Sulaeman, M.H**  
**Nip. 150 254 348**

**Drs. H. Abd. Fatah Idris, M.Si**  
**Nip. 150 274 615**

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Drs. H. Nur Khoirin M. Ag**  
**Nip. 150 254 254**

**Moh. Arifin, S. Ag., M. Hum**  
**Nip. 150 279 720**

## MOTTO

" الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ..."  
(سورة البقرة : ٢٢٩)

*Artinya : "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma' ruf atau menceraikan dengan cara yang baik".<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1996), halaman 28

## PERSEMBAHAN

*Dengan segala kerendahan hati, skripsi yang amat sederhana ini penulis persembahkan kepada :*

- ❖ *Ayahandaku Mustofa Kamal, dan Ibundaku Faizah tersayang atas curahan kasih dan sayangnya yang selalu mendo'akan, mengarahkan, mendidik, memotivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir belajar di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.*
- ❖ *Adik-adikku Luluk Arifatul Khorida dan Habiburrahman terkasih yang telah mendo'akan agar terselesaikannya skripsi ini.*
- ❖ *Semua sahabat-sahabatku, terutama di UKM Walisongo Sport Club (WSC) yang telah membantu dan memberikan semangat serta pelipur lara ketika dalam kegundahan.*

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 8 Januari 2007

Deklarator,

**ABDUL RAZAK NAUFAL**  
**NIM : 2102028**

## ABSTRAK

Dalam kasus perkara nomor 1132/Pdt.G/2005/Pa.Sm tentang putusan verstek dalam perkara perceraian ini hakim tidak bisa mendamaikan kedua belah pihak karena pihak laki-laki (Tergugat) tidak bisa datang tanpa alasan yang sah sehingga putusan diputus secara verstek. Dalam memeriksa perkara ini Hakim Pengadilan Agama Semarang meminta penggugat untuk membuktikan gugatannya dengan alat bukti tulis dan keterangan-keterangan saksi walaupun tergugat tidak hadir, padahal ketentuan verstek (Pasal 125 HIR) tidak mengatur adanya pembuktian.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui data primer yang meliputi wawancara dan dokumentasi, serta data sekunder yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif normatif, yaitu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan norma-norma yang menjadi dasar hakim dalam memeriksa, menerima dan menyelesaikan perkara di pengadilan yang menitikberatkan pada segi perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan analisis penulis dapat diketahui alasan hakim memerintahkan pembuktian adalah :

1. Dalam kasus ini dapat diterapkan asas *Lex Specialis Deragot Lex Generali*, yaitu undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum. Oleh karena itu, perkara ini merupakan pengecualian terhadap ketentuan HIR atau RBg, karena dengan adanya pembuktian dapat menghindari terjadinya perceraian atas dasar persekongkolan antara suami isteri dan melaksanakan asas undang-undang perkawinan, yaitu mempersulit perceraian.
2. Karena pembuktian dapat lebih menunjukkan fungsi hukum dalam memberikan rasa keadilan dan pengayoman pada masyarakat.
3. Pembuktian bermanfaat untuk mengetahui kebenaran gugatan penggugat apakah gugatannya tersebut beralasan hukum atau tidak dan melawan hak atau tidak ?

Dasar pertimbangan hakim dalam Pasal 125 HIR, tidak terdapat kata-kata "harus", melainkan disana digunakan kalimat "diterima" maka menurut penyusun pasal tersebut memberikan keluasaan pada hakim untuk dapat memutus dengan dasar alat bukti (pembuktian) maupun tanpa alat bukti.

Majelis hakim menjatuhkan putusan verstek dalam sidang pertama berdasarkan jabatan atau *ex officio*, meskipun tidak ada permintaan dari pihak penggugat, selain itu pasal 125 HIR / 149 RBg yang dijadikan dasar pertimbangan hukum perkara nomor 1132/Pdt.G/2005/PA.Sm juga memperbolehkan menjatuhkan putusan verstek dalam sidang pertama walaupun hal itu kurang imperatif.

Kata kunci perceraian, verstek dan pembuktian.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, penyinara dunia dan pembawa rahmat bagi makhluk sekalian alam. Tidak ada kata yang pantas penulis ungkapkan kepada pihak-pihak yang membantu proses pembuatan skripsi ini, kecuali terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. DR. H. Abdul Djamil, M.A. selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Drs. Muhyidin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Drs. H. Nur Khoirin M.Ag., selaku dosen pembimbing I, dan Bapak Muhammad Arifin, M. Hum, selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.
4. Segenap dosen Fakultas Syari'ah yang telah membekali pengetahuan kepada penulis pada jenjang pendidikan Sarjana (S-1).
5. Segenap karyawan Fakultas Syari'ah, pegawai Perpustakaan IAIN, Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan TPM yang telah memberikan layanan yang baik kepada penulis.
6. Keluarga penulis, Ayahanda, Ibunda dan adik-adik penulis yang telah memberikan dorongan baik materiil maupun moril dalam mengarungi lautan keilmuan ini.
7. Sahabat-sahabatku, terutama di UKM Walisongo Sport Club (WSC) yang ikut memberikan do'a, motivasi, semangat serta pelipur lara ketika dalam kegundahan selama studi terutama dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT, membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi materi, metodologi, dan



analisisnya. Karenanya, kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berharap semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin.

Semarang, 8 Januari 2007

Penulis

**ABDUL RAZAK NAUFAL**  
**NIM. 2102028**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN DEKLARASI .....	vi
HALAMAN ABSTRAK .....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI .....	x

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Permasalahan .....	7
C. Tujuan Penulisan Skripsi .....	8
D. Tela'ah Pustaka .....	8
E. Metode Penulisan Skripsi .....	10
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	13

### BAB II PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG

A. Tahap Mengajukan Gugatan dan Permohonan .....	16
1. Pengertian Gugatan dan Permohonan .....	16
2. Prosedur Mengajukan Gugatan atau Permohonan .....	17
B. Proses Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Agama .....	19
C. Macam-Macam Putusan.....	35

### BAB III PEMERIKSAAN PERKARA PERCERAIAN DENGAN PUTUSAN VERSTEK DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG

A. Duduk Perkara Perceraian Nomor 1132/Pdt.G/2005/PA.Sm .....	44
---	----

B. Proses Penyelesaian Perkara Nomor 1132/Pdt.G/2005/PA.Sm..	48
C. Pertimbangan Hukum Putusan Hakim Pengadilan Agama Semarang Terhadap Perkara Nomor 1132/Pdt.G/2005/PA.Sm ..	53

#### **BAB IV ANALISIS TERHADAP PERKARA NOMOR 1132/Pdt.G/2005/PA.Sm TENTANG PUTUSAN VERSTEK DALAM PERKARA PERCERAIAN**

A. Analisis Terhadap Adanya Pembuktian dalam Putusan Verstek	56
B. Analisis Terhadap Dasar Hukum dalam Perkara Nomor 1132/Pdt.G/2005/PA.Sm .....	70
C. Analisis Terhadap Alasan Hakim menjatuhkan putusan verstek dalam perkara perceraian nomor 1132/Pdt.G/2005/PA.Sm pada hari pertama persidangan.....	76

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	79
B. Saran-saran .....	80
C. Penutup .....	81

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

#### **DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kepastian hukum merupakan salah satu asas penting untuk tercapainya ketertiban dan ketentraman masyarakat sebagai tujuan dari penyelenggaraan dan penegakan hukum. Sehingga karenanya, kepastian hukum harus senantiasa dapat dijamin keberadaannya dalam setiap penyelenggaraan hukum.

Sebagai upaya menjamin terwujudnya kepastian hukum di atas dalam sistem penyelenggaraan hukum nasional, maka dibuatlah kerangka instrumen yang mengatur mekanisme hukum dalam praktek dilembaga-lembaga peradilan, yaitu yang lazim disebut hukum acara atau hukum formil.

Pengadilan Agama dalam kapasitasnya sebagai salah satu badan peradilan di Indonesia sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, dan sekarang Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

*“Badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.”<sup>1</sup>*

Hukum acara yang mengatur praktek beracara dalam lingkungan Peradilan Agama telah ditentukan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang berbunyi :

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, (Jakarta : Sinar Grafika, Cet. I, 2004), halaman 4

*“Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.”*<sup>2</sup>

Dari kalimat pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah sebagaimana hukum acara yang berlaku pada Peradilan Umum, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Verstek dalam penulisan ada yang menyebut istilah “hukum acara tanpa hadir”<sup>3</sup>. Sedangkan R. Soepomo menyebut “acara luar hadir” (*verstek*)<sup>4</sup>. Di lain pihak, Subekti tetap mempergunakan istilah aslinya, tetapi tulisannya “perstek”, bukan “*verstek*”<sup>5</sup>. Istilah “acara luar hadir” dijumpai juga dalam Kamus Hukum<sup>6</sup> sebagai terjemahan dari *verstek procedure*, dan *verstekvonnis* diberi istilah putusan tanpa hadir atau putusan di luar hadir tergugat atau penggugat. Sistem Common Law memberi istilah “*default procedure*” yang sama maksudnya dengan *verstek procedure*, yaitu acara luar hadir, dan untuk *verstekvonnis* (putusan tanpa hadir) disebut *default judgement*. Tidak terdapat

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, (Jakarta : Sinar Grafika, Cet. I, 2004), halaman 20

<sup>3</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992), halaman 97

<sup>4</sup> Prof. Dr. R. Soepomo, SH., *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1993) halaman 33

<sup>5</sup> Prof. Dr. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Bina Cipta, 1977), halaman 56

<sup>6</sup> Marianne Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda Indonesia*, (Jakarta : Djambatan, 1999), halaman 484

perbedaan maksud yang terkandung dalam istilah Common Law (undang-undang) dengan Civil Law (yurisprudensi) yang dianut di Indonesia.<sup>7</sup>

Verstek sebagai salah satu bentuk putusan pengadilan yang dijatuhkan karena tidak hadirnya tergugat atau para tergugat seluruhnya pada sidang pertama setelah dipanggil secara patut, banyak dijumpai dalam praktek di Pengadilan Agama khususnya dalam perkara perceraian. Sehingga penerapan acara verstek di pengadilan mengacu pada hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan Umum. Yaitu yang termaktub dalam pasal 125 ayat (1) HIR<sup>8</sup> atau Pasal 149 ayat (1) RBg (Reglement Bueten Gewesten) yang berbunyi :

*“Jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan hukum”.*<sup>9</sup>

Dari kalimat dalam pasal tersebut kiranya dapat dijelaskan, bahwa secara teoritik putusan verstek dapat dijatuhkan manakala pihak tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir pada sidang pertama, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya serta gugatan penggugat beralasan

---

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap SH., *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005). Halaman 381

<sup>8</sup> Het Herzience Indonesia Reglement (HIR) atau disebut juga dengan Reglement Indonesia yang di perbarui (RIB) merupakan ketentuan Hukum Acara yang diperuntukkan bagi golongan Bumi Putera dan Timur Asing yang berada di Jawa dan Madura, diberlakukan dengan Stb. 1848 Nomor 16 dan Stb. 1941 Nomor 44. HIR ini merupakan perubahan dari Inlandsh Reglement (IR), sedangkan Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (RBg) atau “Reglement Daerah Seberang” merupakan ketentuan hukum acara yang diperuntukkan bagi golongan Bumi Putera dan Timur Asing yang berada di luar Jawa dan Madura, ditetapkan berdasarkan ordonansi tanggal 11 Mei 1927 dan berlaku berdasarkan Stb. 1927 tanggal 1 Juli 1927. Lihat Drs. H. Abdul Manan, S.H., S.Ip., M.Hum., *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Yayasan Al-Hikmah, 2001) halaman 5-6

<sup>9</sup> R. Soesilo, *RIB / HIR, Dengan Penjelasan*, (Bogor : Politeia, 1985), halaman 83

hukum atau tidak melawan hak tanpa harus didahului dengan pemeriksaan materi perkara.

Tentang kapan boleh dijatuhkan putusan verstek ada yang berpendapat bahwa putusan verstek harus dijatuhkan pada hari sidang pertama, yang mendasarkan pada kata-kata "*ten dage dienende*" dalam pasal 125 HIR / pasal 149 Rbg, yang diartikan sebagai hari sidang pertama. Sebaliknya ada yang berpendapat bahwa kata-kata "*ten dage dienende*" dapat pula diartikan "*ten dage dat de zaak dient*" yang berarti tidak hanya hari sidang pertama saja. Pasal 126 HIR / pasal 150 Rbg memberi kelonggaran untuk dipanggil sekali lagi.<sup>10</sup>

Ketentuan verstek yang diatur dalam Pasal 125 HIR tidak mengatur tentang acara pembuktian sebelum menjatuhkan putusan verstek sehingga dalam prakteknya dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama terjadi penerapan yang berbeda didalam proses putusan verstek, yaitu tetap diadakannya pembuktian dalam perkara perceraian seperti lazimnya proses pemeriksaan perkara biasa, sehingga verstek tidak berbeda dengan proses pemeriksaan putusan biasa. Hal ini berbeda dengan penerapan putusan verstek diluar perkara perceraian, dimana putusan verstek dapat dijatuhkan tanpa adanya pembuktian, karena pembuktian merupakan tindakan yang berlebihan dan pembuktian dapat diperintahkan pada saat pemeriksaan verzet (perlawanan).

---

<sup>10</sup> Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi VI, (Yogyakarta : Liberty, 2002), halaman 102

Menurut Hari Sasangka, bahwa setiap fakta atau peristiwa dalam dalil yang dikemukakan oleh para pihak, terutama mengenai pokok perselisihan, perlu dibuktikan oleh para pihak yang bersengketa. Masalah ini ada perkecualian, kadang ada fakta atau peristiwa tertentu dalam suatu sengketa yang tidak memerlukan pembuktian, salah satunya adalah putusan verstek. Putusan verstek terjadi karena tergugat tidak datang menghadap di persidangan. Hakim meneliti dalil-dalil gugatan penggugat dan kemudian ia memutuskan mengabulkan gugatan pihak penggugat tanpa mewajibkan si penggugat mengajukan alat bukti. Jadi jika tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka pihak yang tidak hadir tersebut dianggap tidak membantah dalil lawan (lihat Pasal 149 RBg / 125 HIR). Adapun pokok pikiran yang menjadi dasar pengaturan tersebut ialah dalam proses perdata perlindungan kepentingan orang sepenuhnya diserahkan kepada individu masing-masing. Jika dalam suatu proses orang tersebut tidak memenuhi panggilan pengadilan untuk membela kepentingannya, maka ia dianggap tidak mampu atau tidak mau membantah dalil-dalil gugatan dari lawannya.<sup>11</sup>

Hal ini sangat bertolak belakang sekali dengan putusan verstek yang dijatuhkan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, dimana putusan verstek yang dijatuhkan harus tetap memerlukan pembuktian, karena pembuktian bermanfaat untuk mengetahui kebenaran tentang apakah syarat gugatan bahwa gugatan beralasan dan gugatan tidak melawan hak. Perintah pembuktian itu perlu dilakukan karena ada kemungkinan dari bunyi gugatan

---

<sup>11</sup> Drs. Hari Sasangka, S.H.,M.H., *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, (Bandung : Mandar Maju, 2005), halaman 4-5



diketahui bahwa gugatan sudah memenuhi syarat verstek namun setelah diperintahkan untuk membuktikan ternyata terbukti sebaliknya. Selain itu pembuktian juga lebih menunjukkan fungsi hukum dalam memberikan rasa keadilan dan pengayoman pada masyarakat. <sup>12</sup>

Perbedaan antara rumusan undang-undang dengan praktek penerapannya dalam lingkup hukum acara seperti ini, dapat menimbulkan masalah yang cukup mendasar kaitannya dengan upaya penegakan hukum. Karena masalah seperti ini dapat menyebabkan atau memicu terjadinya disparitas putusan dalam putusan verstek, yakni majelis hakim satu memeriksa dan memutus sesuai dengan aturan hukum acara yaitu menjatuhkan putusan verstek tanpa adanya pembuktian terlebih dahulu, sedang yang lain menjatuhkan putusan verstek setelah memeriksa materi perkara atau perlu adanya pembuktian terlebih dahulu, dengan amar mengabulkan bila terbukti dan menolak jika tidak terbukti.

Terjadinya disparitas semacam inilah yang merugikan terhadap penegakan hukum, mengingat akan dapat menimbulkan kekaburan hukum yang lebih jauh berdampak pada tidak adanya kepastian hukum dalam putusan verstek.

Bertolak dari uraian diatas, bagaimanakah penerapan dan penyelesaian Pasal 125 HIR / 149 RBg tentang putusan verstek, apakah sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan tuntutan pengadilan dalam masyarakat, serta bagaimana pula pertimbangan hukum

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Muhammad Dardiri, SH., Panitera Muda Pengadilan Agama Semarang tanggal 8 Mei 2006

yang digunakan dalam menerapkan dan menyelesaikan putusan verstek tanpa pembuktian dalam perkara perdata.

Dari sini penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut menjadi sebuah penelitian yang akan dijadikan sebagai bahan skripsi dengan judul **PUTUSAN VERSTEK DALAM PERKARA PERCERAIAN (Studi Analisis Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2005/Pa.Sm Di Pengadilan Agama Semarang)**

## **B. Perumusan Masalah**

Setelah mengkaji dalam berbagai literatur yang ada, terdapat perbedaan antara ketentuan hukum acara perdata Pasal 125 HIR / 149 RBg dengan praktek penerapannya pada perkara perdata diluar perceraian dimana putusan verstek dijatuhkan tanpa adanya pembuktian terlebih dahulu. Hal inilah yang menarik perhatian penyusun untuk dijadikan pokok bahasan dalam karya ilmiah ini.

Untuk memperjelas uraian, maka pembahasannya akan terfokus pada masalah-masalah sebagai berikut :

1. Mengapa hakim dalam menjatuhkan putusan verstek dalam perkara perceraian tetap melakukan pembuktian terlebih dahulu ?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum dalam perkara nomor 1132/Pdt.G/2005/PA.Sm di Pengadilan Agama Semarang ?
3. Mengapa hakim menjatuhkan putusan verstek dalam perkara perceraian nomor 1132/Pdt.G/2005/PA.Sm pada hari pertama persidangan ?

### **C. Tujuan Penulisan Skripsi**

Dalam penyusunan karya ilmiah ini penyusun mempunyai beberapa tujuan, yaitu :

#### **1. Tujuan Materiil**

- a. Mengetahui mengapa hakim dalam menjatuhkan putusan verstek dalam perkara perceraian tetap melakukan pembuktian terlebih dahulu.
- b. Mengetahui dasar pertimbangan hukum dalam perkara nomor 1132/Pdt.G/2005/PA.Sm di Pengadilan Agama Semarang.
- c. Mengetahui alasan hakim menjatuhkan putusan verstek dalam perkara perceraian nomor 1132/Pdt.G/2005/PA.Sm pada hari pertama persidangan ?

#### **2. Tujuan Formil**

Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan program studi Strata Satu (S-1) di Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

### **D. Telaah Pustaka**

Tela'ah pustaka adalah suatu hasil karya para ahli hukum baik berupa karya ilmiah, skripsi maupun tulisan-tulisan yang merupakan hasil penelitian. Adapun beberapa karya ilmiah atau tulisan-tulisan yang penulis jadikan tela'ah dalam skripsi ini yang tentunya menyinggung masalah putusan verstek adalah :

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeraipkartawinata dalam karyanya *“Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek”* menguraikan tentang putusan verstek dengan dilampiri Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia yang berkaitan dengan putusan verstek tersebut. Beliau berpendapat bahwa penerapan putusan verstek dalam perkara perceraian hendaknya hakim berindak arif dan bijaksana agar tidak tergesa-gesa menjatuhkan putusan mengingat bahwa putusan perceraian itu bersifat konstitutif.<sup>13</sup>

Sementara Mukti Arto berpendapat bahwa dalam hal hakim menjatuhkan putusan verstek dalam perkara perceraian, sedapat mungkin dibuktikan dahulu alasan-alasan cerai dengan melihat surat-surat bukti dan mendengar saksi-saksi.<sup>14</sup>

Sedangkan Sudikno Mertokusumo menerangkan bahwa putusan verstek merupakan salah satu fakta atau peristiwa yang tidak memerlukan pembuktian, karena tergugat tidak menghadiri persidangan berarti dianggap mengakui segala dalil penggugat.

Menurut Hari Sasangka bahwa putusan verstek merupakan putusan yang dapat diputus tanpa pembuktian. Karena proses perdata perlindungan kepentingan orang sepenuhnya diserahkan kepada individu masing-masing. Jika dalam suatu proses orang tersebut tidak memenuhi panggilan pengadilan

---

<sup>13</sup> Retnowulan Sutantio, S.H., dan Iskandar Oeraipkartawinata, S.H., *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : Mandar Maju, 1989) halaman 29

<sup>14</sup> Drs. H.A. Mukti Arto, S.H., *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet. I, 1996) halaman 210

untuk membela kepentingannya, maka ia dianggap tidak mampu atau tidak mau membantah dalil-dalil gugatan dari lawannya.

Dari beberapa uraian tela'ah pustaka diatas digunakan untuk membedakan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain yang sejenis sehingga menghindarkan dari adanya duplikasi. Karena itulah penelitian ini akan menjelaskan beberapa hal yang tidak diungkapkan oleh keterangan di atas, sehingga dari sini akan dapat diharapkan suatu penjelasan yang lebih global, argumentatif dan obyektif.

## **E. Metode Penelitian Skripsi**

Pada umumnya ketepatan suatu hasil penelitian sangat ditentukan oleh kemampuan peneliti dalam memilih metode penelitian yang relevan dengan permasalahan yang diangkat, tujuan penelitian yang ingin dicapai dan kerangka teori yang diperoleh. Metode penelitian di sini bukanlah semata-mata metode yang dipakai dalam mengumpulkan data, akan tetapi mencakup aspek yang lebih luas seperti metode penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data yang dipakai dalam penelitian. Oleh karena itu pembahasan berikut ini akan diurutkan sesuai dengan urutan yang di atas.

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud memahami fenomena-fenomena yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak

menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya <sup>15</sup>. Penelitian kualitatif ini bersifat normatif, yaitu meliputi penelitian terhadap asas-asas dan kaidah-kaidah hukum. Dalam penelitian ini dilakukan telaah terhadap asas hukum, peraturan perundang-undangan dan pendapat para hakim tentang putusan verstek dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang.

## **2. Metode Pengumpulan Data**

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan, diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh berkenaan dengan masalah-masalah yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasan. Adapun data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui data primer dan sekunder.

### **1. Data Primer**

Data primer diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan di Pengadilan Agama Semarang yang mempergunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.

#### **a. Wawancara**

Wawancara adalah cara memperoleh informasi dengan bertanya secara langsung kepada siapa yang akan diwawancarai,

---

<sup>15</sup> Prof. DR. Lexy J. Moeloeng, M.A., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2004), halaman 6

hal tersebut merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi secara langsung<sup>16</sup>.

Teknik wawancara yang digunakan adalah dengan wawancara *semi structured* kepada para ahli hukum, baik itu yang berlaku positif karena diundangkan oleh negara maupun kepada para ahli hukum Islam, yaitu ahli hukum yang menguasai secara literal, dan kontekstual hukum acara Islam. Adapun wawancara *semi structured* yaitu pedoman wawancara yang mula-mula pewawancara menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.<sup>17</sup>

Wawancara dilakukan terhadap subyek penelitian. Subyek penelitian adalah mereka yang terkait dalam putusan verstek dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang yang terdiri dari Hakim, Panitera dan Pengacara.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi atau penelusuran dokumen, adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, surat kabar, prasasti, agenda, dan sebagainya<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm 67.

<sup>17</sup> Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan dan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, Cet. XI, 1997), halaman 231-232

<sup>18</sup> *Ibid*, halaman 236

dengan menelusuri dan mempelajari dokumen berkas perkara nomor 1132/Pdt.G/2005/PA.Sm yaitu tentang putusan verstek dalam perkara perceraian.

## 2. Data Sekunder

Untuk mengambil data sekunder, dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Adapun data sekunder ini berupa pendapat-pendapat, tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak yang berwenang.

## 3. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh melalui data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis. Data yang kurang atau tidak relevan diabaikan sedangkan data yang bermanfaat akan diolah secara sistematis. Adapun untuk menganalisis data yang diperoleh digunakan metode deskriptif normatif, yaitu metode yang digunakan untuk mendiskripsikan norma-norma yang menjadi dasar para hakim dalam menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara di pengadilan yang menitikberatkan pada segi perundang-undangan yang berlaku atau hukum positif<sup>19</sup> dan juga dalam hukum acara Islam.

---

<sup>19</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rake Sarasin, 1989) halaman 68-69



## **F. Sitematika Penulisan Skripsi**

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika dari hasil penelitian mengacu pada buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo yang terdiri dari lima bab, dimana masing-masing bab ada keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sistematika penulisan ini bertujuan agar penulisan skripsi terarah dan sistematis.

Adapun gambaran yang lebih jelas mengenai skripsi ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan permasalahan, tujuan penelitian, tela'ah pustaka, metodologi penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

Bab ini menerangkan tentang tata cara mengajukan gugatan atau permohonan dan tahap-tahap pemeriksaan perkara perdata. Pada bab ini pula di jelaskan macam-macam putusan yang didalamnya termasuk putusan verstek dan hukum pembuktian dalam perkara perdata, dimana dalam perkara perceraian putusan verstek dijatuhkan dengan pembuktian terlebih dahulu sedangkan dalam teorinya putusan verstek merupakan perkara atau peristiwa yang tidak memerlukan pembuktian terlebih dahulu.

### BAB III PEMERIKSAAN PERKARA PERCERAIAN DENGAN PUTUSAN VERSTEK DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Bab ini menguraikan gambaran tentang materi-materi dan teori-teori yang berhubungan dengan proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum perkara Nomor 1132/Pdt.G/2005/PA.Sm dengan putusan verstek di Pengadilan Agama Semarang. Materi-materi dan teori-teori ini merupakan landasan yang mendasari analisis hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian lapangan yang mengacu pada pokok-pokok permasalahan yang telah disebutkan dalam Bab I.

### BAB IV ANALISIS TERHADAP PERKARA NOMOR 1132/Pdt.G/2005/PA.Sm TENTANG PUTUSAN VERSTEK DALAM PERKARA PERCERAIAN

Bab ini akan disajikan data yang diperoleh dari hasil penelitian baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan yang telah dianalisis. Pembahasan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, tidak menyimpang dari pokok-pokok permasalahan yang telah disebutkan dalam Bab I. Sistematika penyajian data dan pembahasan sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang ada.

### Bab V PENUTUP

Bab berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan. Jadi bab ini merupakan kristalisasi pemikiran yang disajikan berupa pokok-pokok dari jawaban atas pertanyaan yang peneliti ajukan. Lalu di bab ini

pula diberikan saran-saran ilmiah, dari berbagai kekurangan yang ada, sehingga dengan demikian akan memudahkan penelitian lebih lanjut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, (Jakarta : Sinar Grafika, Cet. I, 2004)
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Agama*, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, (Jakarta : Sinar Grafika, Cet. I, 2004)
- Drs. H. Abdul Manan, S.H., S.Ip., M.Hum., *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Yayasan Al-Hikmah, 2001)
- R. Soesilo, *RIB / HIR, Dengan Penjelasan*, (Bogor : Politeia, 1985)
- Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi VI, (Yogyakarta : Liberty, 2002)
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992)
- Prof. Dr. R. Soepomo, SH., *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1993)
- Prof. Dr. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Bina Cipta, 1977)
- Marianne Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda Indonesia*, (Jakarta : Djambatan, 1999)
- M. Yahya Harahap SH., *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005)
- Drs. Hari Sasangka, S.H., M.H., *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, (Bandung : Mandar Maju, 2005)
- Wawancara dengan Drs. Dardiri, SH., Panitera Muda Pengadilan Agama Semarang tanggal 8 Mei 2006
- Retnowulan Sutantio, S.H., dan Iskandar Oeraipkartawinata, S.H., *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : Mandar Maju, 1989)
- Drs. H.A. Mukti Arto, S.H., *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet. I, 1996)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986)
- Prof. Dr. Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan dan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, Cet. XI, 1997)
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rake Sarasin, 1989)

## BAB II

### PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN

#### AGAMA SEMARANG

#### A. Tahap Mengajukan Gugatan dan Permohonan

##### 1. Pengertian Gugatan dan Permohonan

Untuk memulai dan menyelesaikan pemeriksaan persengketaan perkara perdata yang terjadi antara anggota masyarakat, salah satu pihak yang bersengketa harus mengajukan permintaan pemeriksaan persengketaan kepada pengadilan. Dalam perkara gugatan terdapat dua pihak yang saling berhadapan, yaitu *penggugat* (الْمُدْعَى) dan *tergugat* (الْمُدْعَى عَلَيْهِ), sedang dalam perkara permohonan hanya ada satu pihak saja yaitu pemohon. Namun demikian di Pengadilan Agama ada permohonan yang perkaranya mengandung sengketa, sehingga di dalamnya ada dua pihak yang disebut *pemohon* dan *termohon*, yaitu dalam perkara izin ikrar talak dan permohonan izin beristri lebih dari seorang.<sup>1</sup>

Surat gugatan ialah surat yang diajukan oleh penggugat kepada ketua pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak. Surat permohonan ialah surat permohonan yang didalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak

---

<sup>1</sup> Drs. H.A. Mukti Arto, SH., *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. I, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), halaman 39

mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap sebagai suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya.<sup>2</sup>

Perbedaan antara gugatan dan permohonan adalah bahwa dalam perkara gugatan atau perkara *kontensius* ada suatu sengketa, suatu konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan. Dalam suatu gugatan ada seorang atau lebih yang merasa bahwa haknya atau hak mereka telah dilanggar, akan tetapi orang yang dirasa melanggar haknya atau hak mereka itu tidak mau secara suka rela melakukan sesuatu yang diminta itu, untuk menentukan siapa yang benar dan berhak, diperlukan adanya suatu putusan hakim. Disini hakim benar-benar berfungsi sebagai hakim yang mengadili dan memutus siapa diantara pihak-pihak itu yang benar dan siapa yang tidak benar<sup>3</sup>.

## 2. Prosedur Mengajukan Gugatan atau Permohonan

Surat gugatan atau permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan ke kepaniteraan Pengadilan Agama. Kemudian penggugat atau pemohon menghadap meja pertama yang akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menulisnya pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Bagi yang tidak mampu dapat di izinkan berperkara secara prodeo (cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dapat dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari lurah atau kepala desa setempat yang dilegalisir oleh camat.

---

<sup>2</sup> *Ibid*,

<sup>3</sup> Retnowulan Sutantio, S.H., dan Iskandar Oeraipkartawinata, S.H., *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : Mandar Maju, 1989), halaman 7

Calon penggugat atau pemohon kemudian menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat gugatan atau permohonan dan SKUM tersebut. Calon penggugat atau pemohon kemudian menghadap pada meja II dengan menyerahkan surat gugatan atau permohonan dan SKUM yang telah dibayar tersebut. Kemudian meja II memasukkan surat gugatan atau permohonan tersebut dalam map berkas perkara dan menyerahkan kepada wakil panitera untuk disampaikan kepada pengadilan melalui panitera.

Setelah perkara terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama, panitera wajib secepatnya menyampaikan perkara itu kepada ketua Pengadilan Agama. Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, ketua pengadilan menunjuk majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam sebuah "penetapan" majelis hakim. Ketua membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke pengadilan kepada majelis hakim untuk diselesaikan.

Berdasarkan perintah hakim atau ketua majelis di dalam penetapan hari sidang, jurusita atau jurusita pengganti melaksanakan pemanggilan kepada para pihak supaya hadir di persidangan pada hari, tanggal dan jam sebagaimana tersebut dalam penetapan hari sidang di tempat persidangan yang telah ditetapkan, dan kemudian majelis hakim memeriksa perkara dengan tahapan-tahapan sidang.

## **B. Proses Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Agama**

Proses penyelesaian perkara perdata di depan sidang dilakukan melalui tahap-tahap dalam hukum acara perdata. Setelah hakim terlebih dahulu berusaha melakukan perdamaian yang dalam perkara perdata pada umumnya diatur dalam pasal 130 HIR / pasal 154 RBg dan pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan dalam perkara perceraian pada khususnya diatur dalam pasal 56 ayat (2), pasal 65, pasal 82, pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 31, pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.<sup>4</sup>

Dalam sengketa yang berkaitan dengan status seseorang (perceraian) maka tindakan hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa untuk menghadapi persengketaan ialah mengupayakan tidak terjadinya perceraian. Hal ini dilakukan pada sidang pertama, dimana kedua belah pihak harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat tinggal diluar negeri dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi, dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Apabila kedua belah pihak bertempat tinggal diluar negeri, maka penggugat dalam sidang perdamaian itu harus menghadap secara pribadi.

Apabila dalam usaha perdamaian hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan prosedur beracara di Pengadilan Agama. Tahap-tahap pemeriksaan tersebut antara lain :

1. Pembacaan gugatan

---

<sup>4</sup> Drs. H.A. Mukti Arto, SH., *Op. Cit.*, halaman 92-93



Surat gugatan bukanlah merupakan alat bukti, tetapi merupakan dalil gugatan yang harus di buktikan dalam persidangan majelis hakim. Oleh karena itu surat gugatan haruslah dibuat dengan baik dan benar, harus lengkap para pihak-pihak yang berperkara, harus memenuhi syarat-syarat dan unsur gugatan atau permohonan yang antara lain sebagai berikut :

- a. Identitas para pihak (Penggugat / Pemohon atau Tergugat / Termohon) yang meliputi : nama, umur, agama, pendidikan, pekerjaan dan tempat tinggal.
- b. *Posita*, yaitu dalil-dalil (penjelasan-penjelasan) keadaan yang konkrit (nyata) mengenai adanya hubungan hukum sebagai dasar permohonan / tuntutan atau alasan-alasan yang mendukung tuntutan / permohonan itu (*Fundamentum Petendi*).
- c. *Petitum*, yaitu tuntutan yang diminta oleh penggugat / pemohon agar dikabulkan oleh hakim, biasanya dibagi dalam dua tuntutan, yaitu *primer* dan *subsidiar*.

## 2. Jawaban Tergugat.

Setelah gugatan dibacakan dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat kemudian tergugat di beri kesempatan untuk mengajukan jawabannya, baik dalam sidang itu juga atau dalam sidang selanjutnya.

Menurut pasal 121 ayat (2) HIR / pasal 145 ayat (2) RBg Jo. Pasal 132 ayat (1) HIR / pasal 158 ayat (1) RBg tergugat dapat mengajukan jawaban secara tertulis atau lisan. Di dalam mengajukan jawaban tersebut

tergugat harus hadir secara pribadi dalam sidang atau diwakilkan oleh kuasa hukumnya, apabila tergugat atau kuasa hukumnya tidak hadir dalam sidang meskipun mengirimkan surat jawabannya, tetapi dinilai tidak hadir dan jawabannya itu tidak perlu diperhatikan, kecuali dalam hal jawaban yang berupa eksepsi atau tangkisan bahwa pengadilan yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkaranya itu.

### 3. Replik Penggugat

Replik berasal dari bahasa latin *replicare* yang berarti jawaban atas jawaban yang diberikan oleh pihak tergugat atau terdakwa dalam sidang pengadilan <sup>5</sup>. Hal ini dilakukan setelah tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian penggugat diberi kesempatan untuk menanggapinya sesuai dengan pendapatnya. Dalam tahap ini mungkin penggugat tetap mempertahankan gugatannya dan menambah keterangan yang dianggap perlu untuk menjelaskan dalil-dalilnya, atau mungkin yang penggugat merubah sikap yang membenarkan jawaban atau bantahan tergugat.

### 4. Duplik Tergugat

Duplik berasal dari bahasa latin *duplica* yang berarti jawaban atau lanjutan dari jawaban tergugat atas replik dari penggugat dalam perkara perdata. Setelah penggugat menyampaikan repliknya, kemudian tergugat diberi kesempatan untuk menanggapi pula.

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia), halaman 509

Dalam tahap ini mungkin tergugat bersikap seperti penggugat dalam repliknya tersebut. Acara replik dan duplik (jawab-menjawab) ini dapat diulangi sampai ada titik temu antara penggugat dan tergugat, dan atau dianggap cukup oleh hakim. Apabila acara jawab menjawab ini telah cukup namun masih ada hal-hal yang tidak disepakati oleh penggugat dan tergugat sehingga perlu dibuktikan kebenarannya, maka acara dilanjutkan ke tahap pembuktian.

## 5. Pembuktian

Dalam memeriksa suatu perkara, hakim bertugas untuk mengkonstatir yang artinya hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang di kemukakan oleh para pihak itu benar-benar terjadi. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui pembuktian.

### a. Pengertian Pembuktian

Hukum pembuktian (*law of evidence*) pada pengadilan agama mengacu pada peradilan umum. Hukum acara ini telah ditentukan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang berbunyi :

“Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.”<sup>6</sup>

Dari kalimat pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan

---

<sup>6</sup> *Undang-Undang Peradilan Agama*, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, (Jakarta : Sinar Grafika, Cet. I, 2004), halaman 20

Agama adalah sebagaimana hukum acara yang berlaku pada Peradilan Umum, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sekarang telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Menurut Subekti, pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan di muka sidang dalam suatu perkara yang disengketakan. Jadi membuktikan itu hanyalah dalam hal adanya perselisihan sehingga dalam perkara perdata di muka pengadilan, terhadap hal-hal yang tidak dibantah oleh pihak lawan, tidak memerlukan untuk dibuktikan.<sup>7</sup>

Menurut H. Riduan Syahrani, yang dimaksud pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Jadi pembuktian hanyalah diperlukan dalam suatu perkara di muka pengadilan. Jika tidak ada perkara atau sengketa di muka pengadilan mengenai hak perdata seseorang, maka pembuktian tersebut tidak perlu dilakukan oleh yang bersangkutan.<sup>8</sup>

Dalam pengertian yang luas pembuktian adalah kemampuan penggugat atau tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan. Sedangkan dalam arti sempit, pembuktian hanya diperlukan sepanjang mengenai hal-hal yang dibantah atau hal yang

---

<sup>7</sup> Prof. Dr. Subekti, SH., *Hukum Pembuktian*, Cet. III (Jakarta : Pradnya Paramita, 1975) halaman 5 dan 13

<sup>8</sup> H. Riduan Syahrani, SH., *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Cet. II, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), halaman 75

masih disengketakan atau hanya sepanjang yang menjadi perselisihan di antara pihak-pihak yang berperkara.<sup>9</sup>

#### **b. Beban Pembuktian**

Dalam perkara perdata soal pembuktian memegang peranan yang amat penting seperti juga dalam perkara pidana. Dalam perkara perdata hakim akan segera memikirkan pertanyaan tentang dasar-dasar yang dikemukakan oleh penggugat telah terbukti atau tidak. Untuk dapat menjawab pertanyaan ini hakim akan melihat pada peraturan tentang pembuktian terhadap perkara-perkara perdata yang tercantum dalam pasal 162-177 HIR, Pasal 282-314 HIR, Pasal 1865-1945 BW.

Dalam pasal 163 HIR, 283 RBg, 1865 BW menentukan :

“Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”.<sup>10</sup>

Berdasarkan ketentuan undang-undang di atas ini, maka kedua belah pihak yang berperkara baik penggugat maupun tergugat dapat dibebani pembuktian. Penggugat yang menuntut suatu hak wajib membuktikan adanya hak itu atau peristiwa yang menimbulkan hak tersebut. Sedangkan tergugat yang membantah adanya hak orang lain (penggugat) wajib membuktikan peristiwa yang menghapuskan atau membantah hak penggugat tersebut. Kalau penggugat tidak dapat

---

<sup>9</sup> Dr. Drs. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum., *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. III, (Jakarta : Kencana, 2005), halaman 227

<sup>10</sup> Departemen Agama, *Himpunan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Departemen Agama Republik Indonesia, 2001), halaman 74

membuktikan kebenaran peristiwa atau hubungan hukum yang menimbulkan hak yang dituntutnya dia harus dikalahkan. Sebaliknya, jika tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran peristiwa yang menghapuskan hak yang dibantahnya maka dia harus dikalahkan.<sup>11</sup>

Apa yang disebut dalam pasal 163 HIR ini adalah yang biasa disebut “pembagian beban pembuktian”, yang maksudnya adalah bahwa yang harus dibuktikan itu hanyalah perbuatan-perbuatan dan kejadian-kejadian yang dipersengketakan oleh kedua belah pihak yang berperkara, artinya yang tidak mendapat persetujuan kedua pihak. Dengan kata lain, bahwa perbuatan-perbuatan dan kejadian-kejadian yang telah diakui atau yang tidak disangkal oleh pihak lawan, tidak usah dibuktikan lagi. Perlu diterangkan disini bahwa juga hal-hal yang telah diketahui oleh umum dan oleh hakim sendiri tidak perlu dibuktikan, sebab “membuktikan” itu berarti “memberikan kepastian kepada hakim” tentang adanya kejadian-kejadian dan keadaan-keadaan itu. Pihak yang mengemukakan sesuatu kejadian atau keadaan, baik penggugat maupun tergugat, yang tidak diakui oleh pihak lawan, harus membuktikan kejadian atau keadaan itu.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> H. Riduan Syahrani, SH., *Op. Cit.*, halaman 79-80

<sup>12</sup> R. Soesilo, *RIB / HIR, Dengan Penjelasan*, (Bogor : Politeia, 1985), halaman 120

### c. Alat-Alat Bukti

Mengenai alat-alat pembuktian dalam acara perdata itu sendiri di dalam HIR ketentuannya dapat kita temukan pada pasal 164 (Pasal 1866 KUH Perdata) yang berbunyi <sup>13</sup> :

“Maka yang disebut alat-alat bukti, yaitu :  
Bukti Surat,  
bukti saksi,  
sangka,  
pengakuan,  
sumpah,  
semua itu dengan memperlihatkan peraturan yang diperintahkan dalam segala pasal dibawah ini”.

Selain daripada apa yang telah penulis kutip diatas mengenai alat-alat pembuktian, HIR masih mengenal alat pembuktian lain yaitu hasil pemeriksaan setempat, seperti yang ditentukan dalam pasal-pasal<sup>14</sup> :

Pasal 153 ayat (1) HIR :

“Jika ditimbang perlu atau ada faedahnya, maka ketua boleh mengangkat satu atau dua orang komisaris daripada dewan itu, yang dengan bantuan panitera pengadilan akan melihat keadaan tempat atau menjalankan pemeriksaan di tempat itu, yang dapat menjadi keterangan kepada hakim”.

Pasal 154 ayat (1) HIR :

“Jika pengadilan negeri menimbang, bahwa perkara itu dapat lebih tenang, jika diperiksa atau dilihat oleh orang ahli, maka dapatlah ia mengangkat ahli itu, baik atas permintaan kedua pihak, maupun karena jabatannya”.

---

<sup>13</sup> Teguh Samudera, SH., *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Cet. I, (Bandung : Alumni, 1992), halaman 35

<sup>14</sup> *Ibid*

Pada ketentuan kedua pasal diatas dapat dijelaskan bahwa hakim diberi kemungkinan apabila diperlukan untuk minta pertolongan dari sebuah panitia untuk memeriksa keadaan sesuatu tempat atau pendapat seorang ahli. Pada hakekatnya kedua hal tersebut adalah merupakan alat atau sarana bagi hakim untuk mencari kebenaran yang hakiki agar dapat menjatuhkan keputusan yang seadil-adilnya.

Dalam prakteknya di persidangan, masih terdapat satu macam alat bukti lagi yang sering dipergunakan, ialah “pengetahuan hakim”. Yang dimaksud dengan “pengetahuan hakim” adalah hal atau keadaan yang diketahuinya sendiri oleh hakim dalam sidang. Misalnya hakim melihat sendiri pada waktu melakukan pemeriksaan setempat bahwa benar ada barang-barang penggugat yang dirusak oleh tergugat dan sampai seberapa jauh kerusakan itu. Perihal pengetahuan hakim tersebut, Mahkamah Agung dengan keputusannya tertanggal 10 April 1957 Nomor 213 K/Sip/1955 telah memberi pendapatnya sebagai berikut :

“Hakim-hakim berdasarkan pasal 138 ayat (1) bersambung dengan pasal 164 Herzeine Indonesisch Reglement tidak ada keharusan mendengar penerangan seorang ahli, sedang penglihatan Hakim pada suatu tanda tangan di dalam sidang boleh dipakai Hakim itu sebagai pengetahuan sendiri di dalam usaha pembuktian”.<sup>15</sup>

Dari putusan tersebut nampak jelas, bahwa “pengetahuan hakim” merupakan alat bukti. Dalam perkara tersebut di atas, hakim yang bersangkutan mempertimbangkan dan menetapkan sendiri perihal

---

<sup>15</sup> Retnowulan Sutantio, S.H., dan Iskandar Oeraipkartawinata, S.H., *Op. Cit*, halaman 61



perbedaan yang menurut penglihatannya nampak antara tanda tangan yang terdapat di atas sehelai surat bukti dan tanda tangan yang bersangkutan yang terdapat pada surat kuasa kepada kuasanya. Sedangkan hal-hal atau keadaan yang diketahui oleh hakim dari pengetahuannya di luar sidang, misalnya bahwa tergugat sesungguhnya adalah anak almarhum, bukan merupakan pengetahuan hakim, melainkan pengetahuan bapak atau ibu hakim pribadi, yang secara kebetulan mengetahui hal tersebut.<sup>16</sup>

#### 1) Alat Bukti Surat atau Tulisan

Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat. Potret atau gambar tidak memuat tanda-tanda bacaan atau buah pikiran, demikian pula denah atau peta, meskipun ada tanda-tanda bacaannya, tetapi tidak mengandung suatu buah pikiran atau isi hati seseorang,<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid*, halaman 61-62

<sup>17</sup> Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi VI, (Yogyakarta : Liberty, 2002), halaman 142

Dasar hukum penggunaan surat atau tulisan sebagai alat bukti adalah Pasal 164 HIR, Pasal 284, 293, 294 ayat (2) RBg, Pasal 1867-1880 dan Pasal 1869, 1874 KUH Perdata, menentukan keharusan ditandatanganinya suatu akta sebagaimana tersebut dalam pasal 165 dan 167 HIR.<sup>18</sup>

Surat sebagai alat bukti tertulis dapat dibedakan dalam akta dan surat bukan akta. Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Sedangkan surat bukan akta adalah surat yang dibuat tidak dengan tujuan sebagai alat bukti dan belum tentu ditandatangani.<sup>19</sup>

## 2) Alat Bukti Saksi

Tidak selamanya sengketa perdata dapat dibuktikan dengan alat bukti tulisan atau akta. Dalam kenyataan bisa terjadi sama sekali penggugat tidak memiliki alat bukti tulisan untuk membuktikan dalil gugatan, atau alat bukti tulisan yang ada, tidak mencukupi batas minimal pembuktian karena alat bukti tulisan yang ada, hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian tulisan. Dalam peristiwa yang demikian, jalan keluar yang dapat ditempuh penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, ialah dengan jalan menghadirkan saksi-saksi yang kebetulan melihat,

---

<sup>18</sup> Dr. Drs. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum., *Op.Cit.*, halaman 240

<sup>19</sup> Drs. H.A. Mukti Arto, SH., *Op. Cit.*, halaman 148

mengalami, atau mendengar sendiri kejadian yang diperkarakan. Apalagi jika saksi yang bersangkutan sengaja minta hadir menyaksikan peristiwa atau hubungan hukum yang terjadi, sangat relevan menghadirkannya sebagai saksi.

Saksi ialah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengan dan ia alami sendiri, sebagai terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.<sup>20</sup>

Dasar hukum alat bukti saksi diatur dalam Pasal 169 sampai 172 HIR dan Pasal 306 sampai 309 RBg, Pasal 1902 sampai 1912 BW. Adapun menurut hukum Islam, dasarnya ialah surat Al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi :

"...وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا..."

Artinya: "...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki maka boleh seorang lelaki bersama dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu sukai, supaya jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila dipanggil ...".<sup>21</sup>

Masih banyak lagi ayat dan hadis tentang saksi tapi ayat yang disebutkan di atas adalah menjadi dasar umumnya, yaitu saksi

<sup>20</sup> *Ibid*, halaman 165

<sup>21</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (PT. Karya Toha Putra, 1996), halaman 70

itu secara umum terdiri dari dua orang lelaki atau seorang lelaki bersama dua orang perempuan, yang semuanya beragama Islam.<sup>22</sup>

Menurut keadaannya alat bukti saksi dapat di bagi atas :

- 1) Saksi kebetulan, yaitu saksi yang secara kebetulan melihat atau mendengar atau mengalami sendiri tentang perbuatan atau peristiwa hukum yang menjadi perkara. Misalnya, A pada waktu ke rumah B secara kebetulan melihat B dan C sedang mengadakan transaksi jual beli.
- 2) Saksi sengaja, yaitu saksi yang pada waktu pembuatan atau peristiwa hukum itu dibuat, sengaja diminta menyaksikannya. Misalnya menyaksikan jual beli tanah yang sedang dilangsungkan.<sup>23</sup>

### 3) Alat Bukti Persangkaan

Pengertian alat bukti persangkaan, lebih jelas dirumuskan dalam Pasal 1915 KUH Perdata, dibandingkan dengan Pasal 173 HIR atau Pasal 310 RBg, yang berbunyi :

“Persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari satu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum”.

Dalam kamus hukum alat bukti ini disebut *vermoedem* yang berarti dugaan atau *presumptie*, berupa kesimpulan yang ditarik oleh undang-undang atau oleh hakim dari suatu hal atau tindakan

---

<sup>22</sup> Dr. H. Roihan A. Rasyid, SH., MA., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. 10, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), halaman 152

<sup>23</sup> Drs. Hari Sasangka, SH., MH., *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Cet. I, (Bandung : Mandar Maju, 2005), halaman 62

yang diketahui, kepada hal atau tindakan lainnya yang belum diketahui.<sup>24</sup>

Barangkali mudah mencerna pengertian yang dikemukakan Subekti, bahwa persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah “terkenal” atau yang dianggap terbukti ke arah suatu peristiwa yang “tidak terkenal”, artinya sebelum terbukti. Atau dengan kata lain, bertitik tolak dari fakta-fakta yang diketahui, ditarik kesimpulan ke arah suatu fakta yang konkret kepastiannya yang sebelumnya fakta itu belum diketahui. Jadi pada langkah pertama, ditemukan fakta atau bukti langsung dalam persidangan, dan dari fakta atau bukti langsung itu, ditarik kesimpulan yang mendekati kepastian tentang terbuktinya fakta lain yang sebelumnya tidak diketahui.<sup>25</sup>

#### 4) Alat Bukti Pengakuan

Sumber hukum positif persangkaan sebagai alat bukti dikemukakan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Sama-sama dapat dijadikan pedoman sesuai lingkup yurisdiksi masing-masing, yang diatur dalam Pasal 174 sampai 176 HIR, Pasal 311 sampai 313 RBg, Pasal 1923 sampai 1928 KUH Perdata.

Pengertian pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, dimana ia mengakui apa-apa yang

---

<sup>24</sup> M. Yahya Harahap, SH., *Op. Cit.*, halaman 684

<sup>25</sup> *Ibid*

dikemukakan oleh pihak lawan. Permulaan pengakuan salah satu pihak yang berperkara dapat dijadikan bukti <sup>26</sup>.

#### 5) Alat Bukti Sumpah

Alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 182-185 dan 314 RBg, Pasal 155-158 dan 177 HIR dan Pasal 1929-1945 KUH Perdata. Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat mahakuasa daripada Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya. Jadi pada hakekatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat religious yang digunakan dalam peradilan. <sup>27</sup>

HIR menyebutkan 3 macam sumpah sebagai alat bukti, yaitu sumpah pelengkap (*suppletoir*), sumpah pemutus yang bersifat menentukan (*decicoir*) dan sumpah penaksiran (*aestimator*).

- 1) Sumpah *suppletoir* (ps. 155 HIR, 182 RBg, 1940 BW) ialah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya.
- 2) Sumpah penaksiran (ps. 182 RBg, 1940 BW) ialah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada

---

<sup>26</sup> Dr. Drs. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum., *Op. Cit.*, halaman 258 dan 259-260

<sup>27</sup> *Ibid*, halaman 179

penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti kerugian. Sumpah penaksiran ini barulah dapat dibebankan oleh hakim kepada penggugat apabila penggugat telah dapat membuktikan haknya atas ganti kerugian itu serta jumlahnya masih belum pasti dan tidak ada cara lain untuk menentukan jumlah ganti kerugian tersebut kecuali dengan taksiran.

- 3) Sumpah *decisoir* (ps. 156 HIR, 183 RBg, 1930 BW) ialah sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya. Pihak yang minta lawannya mengucapkan sumpah disebut *deferent*, sedang pihak yang harus bersumpah disebut *delaat*.<sup>28</sup>

#### 6. Kesimpulan Para Pihak

Pada tahap ini, baik penggugat maupun tergugat diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung menurut pandangan masing-masing.

#### 7. Musyawarah Majelis Hakim

Musyawarah majelis hakim dilakukan secara rahasia dan tertutup untuk umum. Dikatakan rahasia artinya baik dikala musyawarah maupun sesudahnya, kapan dan dimana saja hasil musyawarah majelis tersebut tidak boleh dibocorkan sampai hasil musyawarah tersebut di ucapkan dalam keputusan yang terbuka untuk umum.

---

<sup>28</sup> *Ibid*, halaman 180-182

## 8. Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara. Setiap putusan pengadilan tersebut dalam bentuk tertulis yang harus di tanda tangani oleh hakim ketua sidang dan hakim anggota yang ikut serta memeriksa dan memutuskan perkara serta panitera pengganti yang ikut serta bersidang (Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman). Apa yang diucapkan hakim dalam sidang haruslah benar-benar sama dengan apa yang diucapkan dalam sidang pengadilan.

Hasil akhir dari pemeriksaan perkara di pengadilan karena adanya gugatan dari salah satu pihak adalah putusan atau vonis. Lain halnya dengan perkara permohonan yang hasil akhirnya adalah penetapan atau *beschikking*.

### C. Macam-Macam Putusan

Peranan hakim sebagai aparat kekuasaan kehakiman pasca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, pada prinsipnya tidak lain daripada melaksanakan fungsi peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi peradilan ini para hakim Pengadilan Agama harus menyadari sepenuhnya bahwa tugas pokok hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan. Setelah hakim mengetahui duduk perkara yang sebenarnya,



maka pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai dan kemudian dijatuhkan putusan.

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya ucapan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim dipersidangan <sup>29</sup>.

Adapun macam-macam putusan dapat di tinjau dari aspek kehadiran para pihak dan ditinjau dari sifatnya.

## **1. Aspek Kehadiran Para Pihak**

### **a. Putusan *Gugur***

Bentuk putusan ini diatur dalam Pasal 124 HIR. Jika penggugat tidak datang pada hari sidang yang ditentukan, atau tidak menyuruh wakilnya untuk menghadiri padahal telah dipanggil dengan patut, dalam kasus yang seperti itu hakim dapat dan berwenang menjatuhkan putusan menggugurkan gugatan penggugat. Berbarengan dengan itu, penggugat dihukum membayar biaya perkara. Akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut, dijelaskan dalam pasal 77 Rv :

- 1) Pihak tergugat, dibebaskan dari perkara dimaksud.

Putusan pengguguran gugatan yang didasarkan atas keingkaran penggugat menghadiri sidang pertama, merupakan

---

<sup>29</sup> Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., *Op. Cit.* halaman 202

putusan akhir yang bersifat menyudahi proses pemeriksaan secara formil. Artinya, putusan itu mengakhiri pemeriksaan meskipun pokok perkara belum diperiksa. Itu sebabnya undang-undang menyatakan pihak tergugat dibebaskan dari perkara itu.

- 2) Terhadap putusan pengguguran gugatan tidak dapat diajukan perlawanan atau *verzet*.

Terhadap putusan tersebut, tertutup hak penggugat untuk mengajukan perlawanan atau *verzet*. Sifat putusannya langsung mengakhiri perkara, karena itu langsung pula mengikat kepada para pihak. Selain terhadapnya tidak dapat diajukan perlawanan, juga tertutup upaya hukum, sehingga tidak dapat diajukan banding atau kasasi.

- 3) Penggugat dapat mengajukan gugatan baru.

Satu-satunya jalan yang dapat ditempuh penggugat menghadapi putusan pengguguran gugatan hanya mengajukan gugatan baru dengan materi pokok perkara yang sama, karena dalam putusan pengguguran gugatan tidak melekat *neb is in idem*, sehingga dapat lagi diajukan sebagai perkara baru dan untuk itu penggugat dibebani membayar biaya perkara karena biaya yang semula telah dibayarkan untuk gugatan yang digugurkan.<sup>30</sup>

#### b. Putusan *Verstek*

---

<sup>30</sup> M. Yahya Harahap, SH., *Loc. Cit.* halaman 873-874

Mengenai pengertian verstek, tidak terlepas kaitannya dengan fungsi beracara dan penjatuhan putusan atas perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang kepada hakim untuk menjatuhkan putusan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat. Sehubungan dengan itu, persoalan verstek tidak lepas kaitannya dengan ketentuan Pasal 124 HIR dan Pasal 125 ayat (1) HIR.

Ada beberapa ahli hukum yang menguraikan tentang verstek, antara lain :

- 1) Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia menyatakan, “Bahwa kata verstek itu sendiri berarti pernyataan bahwa tergugat tidak datang pada hari sidang pertama kalau tergugat tidak datang setelah dipanggil dengan patut, maka gugatan dikabulkan dengan putusan diluar hadir atau *verstek*, kecuali kalau gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan”.<sup>31</sup>

Tentang kapan boleh dijatuhkan putusan verstek ada yang berpendapat bahwa putusan verstek harus dijatuhkan pada hari sidang pertama yang mendasarkan kata : “*ten dage dienende*” dalam sidang Pasal 125 HIR – Pasal 149 RBg. yang diartikan sebagai hari sidang pertama dan ada yang berpendapat bahwa kata-kata “*ten dage dienende*” dapat pula diartikan “*ten dage dat de zaak dient*” yang berarti tidak hanya hari sidang pertama saja. Pasal 126 HIR (ps. 150 RBg) memberi kelonggaran untuk dipanggil sekali lagi.

Pada hakekatnya lembaga verstek itu untuk merealisasikan asas *audi et alteram partem*, jadi kepentingan tergugatpun harus

---

<sup>31</sup> Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., *Op. Cit.* halaman 102

diperhatikan, sehingga seharusnya secara *ex officio* hakim mempelajari isi gugatan. Tetapi di dalam praktek sering gugatan penggugat dikabulkan dalam putusan verstek tanpa mempelajari gugatan lebih dahulu.

Apabila gugatan dikabulkan di luar hadir, maka putusannya diberitahukan kepada tergugat (*defaillant*) serta dijelaskan bahwa tergugat berhak mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan verstek itu kepada hakim yang memeriksa perkara itu juga (ps. 125 ayat 3 Jo. 129 HIR, 149 ayat 3 Jo. 153 RBg).

Bagaimanakah kalau kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat, tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan, meskipun kedua-duanya telah dipanggil dengan patut ? Tentang hal ini tidak ada ketentuannya. Tetapi demi kewibawaan badan pengadilan serta agar jangan sampai ada perkara yang beralarut-larut tidak berketentuan, dalam hal ini gugatan perlu dicoret dari daftar dan dianggap tidak pernah ada.<sup>32</sup>

- 2) Ny Retnowulan Sutantio, dan Iskandar Oeraipkartawinata, menerangkan, “Verstek adalah pernyataan bahwa tergugat tidak hadir meskipun ia menurut hukum acara harus datang. Verstek hanya dapat dinyatakan, apabila pihak tergugat kesemuanya tidak datang menghadap pada sidang yang pertama dan apabila perkara diundurkan sesuai dengan Pasal 126 HIR juga pihak tergugat kesemuanya tidak datang menghadap lagi”.<sup>33</sup>

Apabila tergugat dan para tergugat pada sidang yang pertama hadir dan pada sidang berikutnya tidak hadir atau apabila

---

<sup>32</sup> *Ibid*, halaman 103-104

<sup>33</sup> Retnowulan Sutantio, S.H., dan Iskandar Oeraipkartawinata, S.H., *Loc. Cit.*, halaman 25

tergugat atau para tergugat pada sidang pertama tidak hadir lalu hakim mengundurkan sidang berdasarkan Pasal 126 HIR dan pada sidang yang kedua itu tergugat atau para tergugat hadir dan kemudian dalam sidang-sidang selanjutnya tidak hadir lagi, maka perkara akan diperiksa menurut acara biasa dan putusan dijatuhkan secara *kontradiktoir*, juga apabila dalam pemeriksaan tersebut ada seorang atau lebih tergugat dari sekian banyak tergugat tidak pernah hadir dalam sidang pemeriksaan perkara yang bersangkutan terhadap tergugat atau beberapa tergugat yang tidak pernah hadir itu tidak boleh dijatuhkan putusan verstek, melainkan harus putusan *kontradiktoir*.<sup>34</sup>

Untuk menganalisa secara cermat, kiranya perlu penulis turunkan dasar hukum dijatuhkannya putusan verstek, agar kita bisa secara bersama dapat menelaah dengan cermat.

Dasar hukum putusan verstek adalah pasal 125 ayat (1) HIR atau Pasal 149 ayat (1) RBg, yang berbunyi :

“Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan”.<sup>35</sup>

Dari kalimat pasal diatas dapat dijelaskan bahwa, jikalau tergugat tidak datang pada hari perkara itu, lagi pula tidak pula

---

<sup>34</sup> *Ibid*

<sup>35</sup> Departemen Agama, Himpunan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama. *Op. Cit.*, halaman 63

mewakikan kepada kuasanya untuk menghadap meskipun ia sudah dipanggil dengan patut, maka tuntutan dalam surat gugatan itu diterima dengan putusan “*verstek*” atau “*in absensia*” yang artinya putusan tak hadir, kecuali jika nyata pada pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan. Putusan hakim yang dijatuhkan dengan putusan tak hadir ini menurut ketentuan yang tersebut dalam pasal 128 HIR tidak boleh dijalankan sebelum lewat empat belas hari sesudah diberitahukan.<sup>36</sup>

c. Putusan *Kontradiktoir*

Putusan kontradiktoir ialah putusan yang pada saat dijatuhkan atau diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu pihak atau para pihak. Dalam pemeriksaan atau putusan kontradiktoir disyaratkan bahwa baik penggugat maupun tergugat pernah hadir dalam sidang. Terhadap putusan kontradiktoir dapat dimintakan sidang.<sup>37</sup>

## 2. Putusan Ditinjau dari Sifatnya

a. Putusan *Deklaratoir*

Putusan deklaratoir adalah putusan pengadilan yang amarnya menyatakan suatu keadaan di mana keadaan tersebut dinyatakan sah menurut hukum. Dalam putusan ini dinyatakan bahwa keadaan hukum tertentu yang dimohonkan itu ada pengakuan sesuatu hak atas prestasi tertentu dan umumnya putusan model ini terjadi dalam hukum pribadi,

---

<sup>36</sup> R. Soesilo, *Op. Cit.*, halaman 84

<sup>37</sup> Drs. H. A. Mukti Arto, SH., *Loc. Cit.*, halaman 258

misalnya tentang pengangkatan anak, tentang kelahiran, penegasan hak atas suatu benda.<sup>38</sup>

Putusan ini biasanya bersifat menetapkan saja tentang keadaan hukum, tidak bersifat mengadili, karena tidak ada sengketa. Menyatakan dalam amar berarti menyatakan keadaan hukum tertentu yang dimohonkan itu ada demikian atau tidak ada. Jadi fungsinya adalah sebagai penegasan saja dari suatu keadaan yang sudah ada, atau keadaan yang sudah tidak ada.<sup>39</sup>

b. Putusan *Constitutif*

Putusan constitutif adalah putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru. Dalam putusan ini suatu keadaan hukum tertentu dihentikan atau ditimbulkan suatu keadaan hukum baru. Misalnya, putusan tentang pembatasan suatu perjanjian, putusan perceraian dan lain-lain.

Dalam putusan constitutif biasanya tidak diperlukan pelaksanaan dengan paksaan, karena dengan diucapkannya putusan itu, sekaligus keadaan hukum yang lama terhenti dan timbul keadaan hukum baru. Sebagai contoh putusan constitutif biasanya berbunyi sebagai berikut “menyatakan bahwa perkawinan antara A dan B putus karena....”.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Dr. Drs. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum., *Loc. Cit.*, halaman 297-298

<sup>39</sup> *Ibid*, halaman 298

<sup>40</sup> *Ibid*

c. Putusan *Condemnatoir*

Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang memuat amar menghukum salah satu pihak yang berperkara untuk memenuhi suatu prestasi yang ditetapkan oleh hakim. Dalam putusan ini hak perdata penggugat yang dituntutnya terhadap tergugat diakui oleh hakim di muka sidang pengadilan. Dalam putusan ini ada membenaran hak penggugat atas suatu prestasi yang dituntutnya atau sebaliknya tidak ada pengakuan atau tidak ada membenaran suatu prestasi yang dituntutnya.<sup>41</sup>

### 3. Putusan Ditinjau pada Saat Penjatuhannya

a. Putusan *akhir*

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik yang telah melalui semua tahap pemeriksaan maupun yang tidak atau belum menempuh semua tahap pemeriksaan.<sup>42</sup>

b. Putusan *sela*

Putusan sela adalah putusan yang berisi perintah yang mengharuskan para pihak yang berperkara untuk memudahkan hakim menyelesaikan pemeriksaan perkara, sebelum dia menjatuhkan putusan akhir<sup>43</sup>. Putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya persidangan.<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid*

<sup>42</sup> Drs. H. A. Mukti Arto, SH., *Op., Cit.*, halaman 253

<sup>43</sup> M. Yahya Harahap, SH., *Loc., Cit.*, halaman 880

<sup>44</sup> Drs. H. A. Mukti Arto, SH., *Op., Cit.*, halaman 253



### **BAB III**

#### **PEMERIKSAAN PERKARA PERCERAIAN DENGAN PUTUSAN VERSTEK DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

##### **A. Duduk Perkara Perceraian Nomor 1132/Pdt.G/2005/PA.Sm**

Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang yang telah memeriksa dan telah mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama yang telah menjatuhkan putusan dengan nomor perkara 1132/Pdt.G/2005/PA.Sm, yang mana kasus ini sebagai obyek penelitian bagi penulis.

Sebelum penulis mengetengahkan kasus tentang perceraian dengan putusan verstek ini, maka untuk lebih jelasnya akan penulis kemukakan tentang kedudukan orang-orang yang berperkara, serta duduk perkaranya.

Bahwa Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

CHUSNUL CHOTIMAH binti MUCHAMAD SANIF, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Parangsarpo V No. 3 Rt. 03 Rw. 12 Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, sebagai PENGGUGAT.

##### **MELAWAN**

DICKY SETIAWAN bin SUGIYONO, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, semula bertempat tinggal di Jl. Parangsarpo V No. 3 Rt. 03 Rw. 12 Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, sekarang tidak diketahui tempat

tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai  
TERGUGAT.

Karena permasalahan yang penulis kaji adalah perkara perceraian yang diputus secara verstek dengan adanya pembuktian, maka duduk perkaranya diambil dari berita acara persidangan yang menjatuhkan putusan verstek.

Tentang Duduk Perkara

Menimbang bahwa Penggugat dalam suratnya tertanggal 20 Oktober 2005 telah mengajukan gugatan cerai yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan Nomor 1132/Pdt.G/2005/PA.Sm tanggal 20 Oktober 2005, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Rabu, 1 Desember 1999 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pedurungan Kota Semarang sebagaimana ternyata dalam buku Kutipan Akta Nikah nomor : 551/01/XII/1999 tanggal 1 Desember 1999 yang diterbitkan oleh KUA di maksud;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di tempat orang tua Penggugat selama  $\pm$  6 bulan kemudian pindah kontrak rumah hingga 3 tahun lalu Tergugat pergi dan pernah hidup rukun seperti layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANANDA AZIZAH S, lahir 12 April 2000 yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat, serta selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa sejak bulan Mei 2003 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena :

- a. Tergugat pergi tanpa pamit yang hingga sekarang Tergugat tidak pernah pulang, tidak mengirim sesuatu untuk keperluan hidup bagi Penggugat dan anaknya;
  - b. Bahwa sejak pisah hingga sekarang sudah selama 2 tahun 5 bulan Tergugat telah membiarkan dan atau sudah tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat dengan tanpa memberi nafkah wajib baik lahir maupun batin;
  - c. Bahwa Tergugat saat ini sudah tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
4. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut, Tergugat telah melanggar sighth talik talak sebagaimana angka 2 dan 4;
  5. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat talik talak angka 2 dan 4 telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat atas Penggugat dengan iwad Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

**SUBSIDER :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex-Aequo Et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang

lain sebagai kuasanya walaupun menurut berita acara surat panggilan yang dibacakan di persidangan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti :

1. Surat berupa :

Foto copy Kutipan Akta Nikah nomor : 551/01/XII/1999 tanggal 1 Desember 1999 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, bermateri cukup yang setelah dicocokkan dengan aslinya dan dibenarkan oleh Penggugat oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Saksi-saksi, masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

a) SARMO bin WARSO;

- 1) Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga;
- 2) Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, telah dikaruniai anak 1 orang;
- 3) Bahwa sejak awal 2004, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;

b) SITI FAUZIYAH binti H. BADRUN;

- 1) Bahwa saksi mengenal kedua belah pihak berperkara karena sebagai orang dekat;

2) Bahwa kedua belah pihak adalah suami isteri yang dikaruniai anak 1 orang;

3) Bahwa sudah 1 tahun lebih Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan menerangkan bahwa saat ini dalam keadaan suci, selanjutnya Penggugat tidak mengajukan suatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan yang harus dianggap termuat dalam putusan ini;<sup>1</sup>

#### **B. Proses Penyelesaian Perkara Nomor 1132/Pdt.G/2005/PA.Sm.**

Setelah Penggugat mengajukan gugatannya pada tanggal 20 Oktober 2005, kemudian jurusita pengganti Pengadilan Agama Semarang menyampaikan surat panggilan (relaas) dengan nomor 1132/Pdt.G/2005/PA.Sm. kepada Tergugat pada hari Senin 14 November 2005, tetapi tidak bertemu langsung dengan Tergugat dan kemudian relaas diberikan kepada kepala desa supaya di sampaikan kepada Tergugat. Pengadilan Agama Semarang juga memanggil Tergugat untuk menghadap ke persidangan melalui masmedia PT. Radio Kalimasadha tertanggal 27 Oktober 2005 dan tanggal 28 November 2005. Tetapi Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan pula tidak menyuruh orang lain untuk menghadap dipersidangan sebagai kuasanya. Kemudian majelis Pengadilan

---

<sup>1</sup> Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1132/Pdt.G/2005/Pa.Sm, halaman 1-6

Agama Semarang memeriksa perkara-perkara perdata tingkat I yang dilangsungkan di ruang sidang gedung Pengadilan Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2006 dalam perkara cerai gugat. Tenggang waktu antara pendaftaran gugatan sampai proses persidangan adalah 3 Bulan 18 hari.<sup>2</sup>

Adapun proses penyelesaian perkara nomor 1132/Pdt.G/2005/PA.Sm. adalah :

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua majelis, para pihak berperkara dipanggil masuk ke ruang persidangan.

Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya meskipun sesuai relaas masmedia PT. Radio Kalimasadha tertanggal 27 Oktober 2005 dan tanggal 28 November 2005, yang dibacakan ketua majelis dalam persidangan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Kemudian ketua majelis menasehati penggugat agar tetap sabar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, penggugat tetap pada pendiriannya semula, maka persidangan dilanjutkan dan persidangan dinyatakan tertutup untuk umum.

Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 20 Oktober 2005 Nomor 1132/Pdt.G/2005/PA.Sm yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan ataupun tambahan ;

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Drs. Dardiri, S.H., *Panitera Muda Hukum*, Pengadilan Agama Semarang, tanggal 19 September 2006

Kemudian atas pertanyaan majelis hakim Penggugat menyatakan hari ini telah siap dengan saksi-saksi tetapi sebelumnya Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy kutipan Akta Nikah Nomor : 551/01/XII/1999 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Pedurungan Kota Semarang tertanggal 1 Desember 1999, bermaterai cukup.
2. Surat Keterangan Mafqut atas diri Tergugat yang diterbitkan pejabat kelurahan Tlogosari Kulon Nomor : 472/211/X/2005 tanggal 19 Oktober 2005.

Selanjutnya oleh ketua majelis dipanggil masuk dan menghadaplah para saksi, yang atas pertanyaa majelis, para saksi menyatakan bersedia menerangkan yang sebenarnya tidak lain yang sebenarnya dibawah sumpah;

Setelah para saksi mengucapkan sumpah dan janji menurut tata cara agama Islam, pemeriksaan dimulai dengan mendengar keterangan saksi yang mengaku bernama:

SARMO bin WARSO umur 55 Tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Parangsarpo V Rt. 3 Rw. 12 Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang dan menjawab pertanyaan hakim sebagai berikut :

1. Ada hubungan apa saudara dengan Penggugat dan Tergugat ?

Jawab : ya, saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan apa-apa, hanya sebagai tetangga.

2. Apa saudara mengetahui bagaimana kehidupan Penggugat dan Tergugat.

Jawab : a. Penggugat dan Tergugat suami istri yang telah di karunia  
anak 1 orang yang sekarang dalam asuhan Penggugat;  
b. Yang saksi ketahui sejak awal 2004 Tergugat pergi tanpa  
pamit Penggugat dan tidak diketahui tujuan alamat  
kepergiannya hingga sekarang;  
c. Dan selama pergi tersebut tidak pernah mengirim khabar  
berita atau sesuatu apapun;

3. Apakah saudara pernah mendengar atau mengetahui Tergugat kirim  
sesuatu kepada Penggugat ?

Jawab : Tidak

4. Apakah masih ada keterangan yang akan saudara sampaikan ?

Jawab : Tidak

Terhadap keterangan saksi pertama tersebut Penggugat membenarkan  
kemudian dilanjutkan mendengar keterangan saksi kedua yang mengaku  
bernama :

SITI FAUZIYAH binti H. BADRUN, umur 45 tahun, agama Islam,  
pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Parangsarpo V Rt. 3 Rw. 12,  
Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, dan  
menjawab pertanyaan hakim sebagai berikut :

1. Apa hubungan saudara dengan Penggugat dan Tergugat ?

Jawab : Ya, saya kenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga  
dekatnya,

2. Apakah saudara mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan  
Tergugat?



- Jawab : a. Penggugat dan Tergugat suami istri yang telah di karuniai anak 1 orang yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- b. Yang saksi ketahui sejak awal 2004 Tergugat pergi tanpa pamit Penggugat dan tidak diketahui tujuan alamat kepergiannya hingga sekarang;
- c. Dan selama pergi tersebut tidak pernah mengirim kabar berita atau sesuatu apapun;

3. Apakah masih ada keterangan yang akan saudara sampaikan ?

Jawab : Tidak

Terhadap keterangan saksi kedua tersebut Penggugat membenarkan, selanjutnya Penggugat memohon putusan yang se-adil-adilnya, atas pertanyaan ketua majelis Penggugat mengaku dalam keadaan suci, maka kemudian ketua majelis menyatakan sidang di skors untuk musyawarah majelis dan Penggugat diperintahkan untuk keluar ruang persidangan;

Setelah Majelis Hakim selesai bermusyawarah lalu persidangan oleh Ketua Majelis dibuka kembali dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian Penggugat dipanggil masuk ke ruang persidangan;

Kemudian Ketua Majelis membacakan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;-----
3. Menetapkan syarat ta'lik talak angka 2 dan 4 telah terpenuhi;-----

4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (DICKY SETIAWAN bin SUGIYONO) atas Penggugat (CHUSNUL CHOTIMAH binti MUHAMMAD SANIF)
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.252.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Dua Rupiah);-----

Setelah putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis memerintahkan kepada juru sita pengganti untuk memberitahukan putusan tersebut kepada Tergugat lewat Pemerintah Kota Semarang, selanjutnya sidang dinyatakan ditutup;<sup>3</sup>

### **C. Pertimbangan Hukum Putusan Hakim Pengadilan Agama Semarang Terhadap Perkara Nomor 1132/Pdt.G/2005/PA.Sm.**

Sebagaimana telah tersebut dalam pembahasan sebelumnya, bahwa pemeriksaan adalah merupakan proses penemuan fakta hukum sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Dalam hal memberikan keputusan Pengadilan Agama menggunakan dasar sebagai bahan pertimbangan bagi perkara-perkara yang telah diajukan, yang berupa hukum-hukum positif yang masih berlaku di Indonesia maupun kitab-kitab fiqh klasik yang biasa digunakan ulama-ulama dahulu. Adapun pertimbangan hukum putusan hakim Pengadilan Agama Semarang terhadap perkara nomor 1132/Pdt.G/2005/PA.Sm. adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

---

<sup>3</sup> *Berita Acara Persidangan*, Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1132/Pdt.G/2005/PA.Sm

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tidak didasarkan pada suatu alasan yang sah sedang yang bersangkutan telah dipanggil lewat masmedia PT. Radio Kalimasadha tertanggal 27 Oktober 2006 dan tanggal 28 November 2005, secara sah dan patut, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti Penggugat telah dapat dibuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat talik talak;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat seperti tersebut di atas, telah dikuatkan oleh keterangan para saksi, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai anak 1 orang;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sudah 1 tahun lebih pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melanggar talik talak angka 2 dan 4;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat terbukti telah melanggar talik talak, maka Penggugat harus membayar uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebagai iwadh untuk jatuhnya talak khul'y Tergugat atas Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi maksud pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan sedang gugatan Penggugat tidak melawan hak, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi pasal 125 HIR, pada saat ini Penggugat dalam keadaan suci;<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1132/Pdt.G/2005/Pa.Sm, halaman 5-6

## **BAB IV**

### **ANALISIS TERHADAP PERKARA NOMOR 1132/Pdt.G/2005/Pa.Sm TENTANG PUTUSAN VERSTEK DALAM PERKARA PERCERAIAN**

#### **A. Analisis Terhadap Adanya Pembuktian Dalam Putusan Verstek**

Pada bab sebelumnya penulis telah kemukakan tentang putusan verstek dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang dengan nomor perkara 1132/Pdt.G/2005/Pa.Sm yang isinya tentang cerai gugat yang diputus secara verstek dengan adanya pembuktian terlebih dahulu. Sesuai dengan pembahasan bab ini, penulis akan menganalisa putusan tersebut dalam hal pembuktiannya dalam putusan verstek.

Dalam pengertian yang luas pembuktian adalah kemampuan penggugat atau tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan. Sedangkan dalam arti sempit, pembuktian hanya diperlukan sepanjang mengenai hal-hal yang dibantah atau hal yang masih disengketakan atau hanya sepanjang yang menjadi perselisihan di antara pihak-pihak yang berperkara.<sup>1</sup>

Dalam perkara perceraian yang diputus secara verstek di Pengadilan Agama Semarang dengan nomor perkara 1132/Pdt.G/2005/Pa.Sm, hakim telah

---

<sup>1</sup> Dr. Drs. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum., *Penerapan Hukum Acara Perdata dii Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. III, (Jakarta : Kencana, 2005), halaman 227

membebaskan penggugat dengan alat-alat bukti tulis yang berupa Foto copy kutipan Akta Nikah Nomor : 551/01/XII/1999 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Pedurungan Kota Semarang tertanggal 1 Desember 1999, bermaterai cukup dan surat keterangan Mafqut atas diri Tergugat yang diterbitkan pejabat Kelurahan Tlogosari Kulon Nomor : 472/211/X/2005 tanggal 19 Oktober 2005. Selain itu penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang bernama Sarmo bin Warso dan Siti Fauziyah binti H. Badrun. Terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkan apa yang telah dikatakan saksi-saksi. <sup>2</sup>

Dalam memeriksa suatu perkara, hakim bertugas untuk mengkonstatir yang artinya hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang di kemukakan oleh para pihak itu benar-benar terjadi. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui pembuktian. Hukum pembuktian (*law of evidence*) pada pengadilan agama mengacu pada peradilan umum. Hukum acara ini telah ditentukan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang berbunyi :

“Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.” <sup>3</sup>

Menurut undang-undang tersebut, Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus

---

<sup>2</sup> *Berita Acara Persidangan*, Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1132/Pdt.G/2005/Pa.Sm

<sup>3</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Agama*, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, (Jakarta : Sinar Grafika, Cet. I, 2004), halaman 20

dalam undang-undang tersebut. Dalam undang-undang tersebut ternyata tidak terdapat ketentuan khusus mengenai pembuktian dalam hal dijatuhkan putusan verstek. Karena tidak diatur secara khusus, maka dalam penerapan penjatuhan putusan verstek harus mengacu kepada ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum adalah HIR bagi daerah Jawa dan Madura dan RBg bagi daerah luar Jawa dan Madura. Sedangkan ketentuan mengenai putusan verstek yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum tidak disinggung sama sekali mengenai pembuktian dalam hal dijatuhkan putusan verstek. Hanya dalam pasal 129 ayat (3) HIR atau Pasal 153 RBg dinyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan verstek diajukan dan diperiksa dengan cara biasa sama halnya dengan gugatan perkara perdata. Kemudian dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 9 Tahun 1964, dinyatakan bahwa pelawan (opposan) terhadap putusan verstek berkedudukan sebagai tergugat semula. Hal ini berarti bahwa pelawan adalah tetap menjadi tergugat. Pelawan sebagaimana diterangkan diatas, berkedudukan sebagai tergugat dan pada terlawan sebagai penggugat asal diletakkan beban untuk lebih dahulu memberi alat-alat pembuktian<sup>4</sup>. Dari sini terdapat isyarat bahwa ketika dijatuhkan putusan verstek belumlah dilakukan pembuktian. Pembuktian baru diadakan sesudah ada perlawanan. Hal demikian sangat sesuai

---

<sup>4</sup> SEMA Nomor 9 Tahun 1964 Tanggal 13 April 1964

dengan azas umum pembuktian bahwa tidak ada pembuktian kalau dalil gugatan diakui.

Hari Sasangka berpendapat, jika tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka pihak yang tidak hadir tersebut dianggap tidak membantah dalil lawan (lihat Pasal 125 HIR / 149 RBg). Adapun pokok pikiran yang menjadi dasar pengaturan tersebut ialah dalam proses perdata perlindungan kepentingan orang sepenuhnya diserahkan kepada individu masing-masing. Jika dalam suatu proses orang tersebut tidak memenuhi panggilan pengadilan untuk membela kepentingannya, maka ia dianggap tidak mampu atau tidak mau membantah dalil-dalil gugatan dari lawannya.<sup>5</sup>

Nur Khoirin berpendapat bahwa putusan verstek dalam perkara perceraian sebaiknya tetap dilakukan pembuktian, karena asas undang-undang perkawinan adalah mempersulit perceraian, sedangkan perkara selain perceraian yang diputus secara verstek dapat dijatuhkan tanpa pemeriksaan materi perkara terlebih dahulu.<sup>6</sup>

R. Subekti, mengemukakan bahwa hal-hal yang harus dibuktikan hanyalah hal-hal yang menjadi perselisihan, yaitu segala apa yang diajukan pihak yang satu tetapi disangkal atau dibantah oleh pihak lain. Hal-hal yang diajukan oleh

---

<sup>5</sup> Drs. Hari Sasangka, S.H.,M.H., *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, (Bandung : Mandar Maju, 2005), halaman 4-5

<sup>6</sup> Wawancara dengan Drs. H. Nur Khorin, M.Ag., Pengacara LPKBHI Semarang, tanggal 26 September 2006



satu pihak dan diakui oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan karena tentang itu tiada perselisihan.<sup>7</sup>

Dalam hal dijatuhkan putusan verstek tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, maka ketidakhadirannya itu bisa dianggap tidak mengadakan perlawanan atau mengakui dalil gugatan. Karenanya tidak diperlukan pembuktian ketika dijatuhkan putusan verstek. Barulah diadakan pembuktian kalau tergugat yang dikalahkan dalam putusan verstek itu mengajukan perlawanan (verzet), karena tuntutan verzet berkedudukan sebagai jawaban atas gugatan penggugat. Hal demikian sangat logis dan sesuai dengan azas umum pembuktian diatas.

Sudikno Mertokusumo, mengemukakan beberapa peristiwa yang menurut beliau tidak perlu pembuktian, antara lain adalah dalam hal dijatuhkan putusan verstek.<sup>8</sup>

Lain hal nya dengan pendapat H. Abdul Manan, bahwa dalam hal putusan verstek terhadap perkara perceraian sebaiknya tetap dilaksanakan pembuktian tentang kebenaran dalil penggugat, dan perlu dipanggil pihak keluarga masing-masing pihak atau orang dekat dengan penggugat atau tergugat guna didengar keterangannya dalam rangka usaha perdamaian secara maksimal.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Prof. R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Bina Cipta, 1977), halaman 81-82

<sup>8</sup> Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. I, (Yogyakarta : Liberty, 2002) halaman 125

<sup>9</sup> Dr. Drs. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum., *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama.*, Cet. III, (Jakarta : Prenada Media, 2005), halaman 236-237

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa menurut Pasal 125 HIR atau Pasal 149 RBg akibat tidak menghadap ini (maksudnya, tergugat tidak hadir) ialah bahwa permohonan gugat dikabulkan diluar hadirnya tergugat (verstek), kecuali apabila ternyata bagi hakim bahwa gugatannya itu tidak berdasarkan atas hukum atau tidak berdasar atas keadaan yang dikemukakan oleh penggugat. Peraturan yang belakangan ini menunjukkan bahwa hakim harus selalu waspada. Meskipun tidak ada perlawanan sama sekali hakim harus meniti periksa, apakah pengabulan permohonan gugat adalah sesuai dengan hukum perdata yang berlaku. Selanjutnya perlu diingatkan, bahwa hakim harus melakukan peradilan, hal mana tidak berarti bahwa hakim harus memenuhi semua kemauan penggugat dalam hal tidak ada perlawanan dari pihak tergugat. Perihal keadaan yang dijadikan dasar gugat alasan gugatan hakim dengan tiada perlawanan dari pihak tergugat, pada umumnya adalah praktis terikat kepada keadaan sebagai yang dikemukakan oleh penggugat. Apabila hakim telah tahu sendiri, baik oleh karena pengetahuan sendiri keadaan yang sebenarnya tentang keadaan yang dikemukakan penggugat, adalah tidak cocok dengan kenyataan, maka hakim wajib menolak permohonan penggugat meskipun tergugat sendiri tidak mengadakan perlawanan. Apabila dalam kenyataan dari keadaan yang dikemukakan oleh penggugat ada keraguan, maka hakim dapat memerintahkan kepada penggugat supaya membuktikan kebenaran keadaan itu. Jadi menurut beliau, pada prinsipnya apabila dijatuhkan putusan verstek tidaklah perlu pembuktian, kecuali jika hakim ragu-ragu bahwa alasan yang dikemukakan penggugat tidaklah sesuai dengan keadaan yang

sebenarnya, maka hakim dapat atau tidak harus memerintahkan penggugat supaya membuktikan alasan-alasan yang dikemukakan dalam gugatan. Bahkan beliau berpendapat, bahwa apabila hakim mengetahui sendiri keadaan sebenarnya, baik melalui pengetahuan sendiri maupun pengetahuan umum, maka hakim tidak boleh menjatuhkan putusan verstek dengan mengabulkan, tetapi wajib menolaknya, meskipun tergugat tidak hadir <sup>10</sup>.

Kutipan beberapa pendapat ahli hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut HIR / RBg tidaklah diperlukan pembuktian ketika dijatuhkan putusan verstek, kecuali hakim ragu-ragu mengenai kebenaran alasan yang dikemukakan penggugat, barulah hakim dapat memerintahkan penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya. Maka dalam hal akan dijatuhkan putusan verstek, tentunya hakim tidak hanya mempelajari surat gugatan, apakah gugatan tersebut berdasar atas hukum atau tidak, beralasan atau tidak. Kalau ternyata gugatan berdasarkan hukum atau setidaknya tidak dilarang oleh hukum dan beralasan, maka dijatuhkanlah putusan verstek dengan mengabulkan gugatan. Apabila ternyata setelah dipelajari gugatan justru sebaliknya, yakni tidak berdasarkan hukum atau bahkan berlawanan dengan hukum, maka gugatan diputus verstek dengan amar menyatakan "gugatan tidak dapat diterima". Demikian juga apabila ternyata gugatan tidak beralasan, maka dijatuhkan putusan verstek dengan amar putusan menolak gugatan penggugat. Dalam hal ini Gatot Suparmono, menyatakan lebih

---

<sup>10</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Bandung : Bale, 1988), halaman 59

tegas lagi bahwa dalam menjatuhkan putusan verstek tidak dilakukan pembuktian. Hakim hanya diperintahkan untuk melihat, apakah gugatan penggugat melawan hak atau tidak beralasan <sup>11</sup>. Dalam mempelajari isi gugatan tersebut tidak perlu menempuh cara pembuktian, kecuali hakim ragu-ragu mengenai alasan yang dikemukakan penggugat, kecuali jika undang-undang sendiri telah menentukan bahwa untuk membuktikan sesuatu hal haruslah dengan suatu bukti tertentu, seperti pembuktian tentang adanya suatu perkawinan, yang oleh hukum ditentukan hanya dengan akta nikah (Pasal 7 Ayat (I) Kompilasi Hukum Islam (KHI)). Dalam hal demikian, seandainya pihak lawan mengakui bahwa pihak lain itu adalah suami atau isterinya, pengakuan tersebut tidaklah cukup sebagai bukti adanya perkawinan antara keduanya, karena undang-undang sendiri telah menentukan secara limit bahwa bukti perkawinan hanyalah dengan akta nikah. Demikian juga dalam hal apabila tergugat tidak hadir dipersidangan, maka hakim tidak boleh menetapkan bahwa antara penggugat dan tergugat terikat perkawinan yang sah atas dasar semata-mata menyimpulkan dari ketidakhadiran tergugat dalam persidangan yang menunjukkan bahwa tergugat mengakui dalil penggugat, tetapi hakim harus membebani penggugat untuk membuktikan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah melalui bukti akta nikah. Sementara untuk hal lain yang tidak ditentukan pembuktiannya secara khusus oleh undang-

---

<sup>11</sup> Gatot Suparmono, SH., *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Cet. I, (Bandung : Alumni, 1993), halaman 18

undang, maka ketika akan dijatuhkan putusan verstek tidaklah diperlukan pembuktian.

Di Pengadilan Agama sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dalam praktek pelaksanaan mengenai putusan verstek, khususnya dalam perkara Nomor 1132/Pdt.G/2005/Pa.Sm tentang perceraian tidak menggunakan sepenuhnya pasal tersebut diatas, walau dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dinyatakan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini.

Menurut A. Mukti Arto, pada prinsipnya pemeriksaan perkara di pengadilan agama mengacu pada hukum acara perdata pada umumnya, kecuali yang diatur secara khusus yaitu dalam memeriksa perkara sengketa perkawinan. Hukum acara khusus itu diatur dalam :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 9 Tahun 1975
- c. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- d. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali hakim.
- e. Peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan sengketa perkawinan.
- f. Kitab-kitab fiqh Islam sebagai sumber penemuan hukum.

g. Yurisprudensi sebagai sumber hukum.<sup>12</sup>

Menurut Hj. Basri'ah Asmopawiro, bahwa putusan verstek dalam perkara nomor 1132/Pdt.G/2005/Pa.Sm tentang perceraian tetap dilakukan pembuktian, karena hal ini tidak cukup hanya mendasarkan pada Pasal 125 HIR / Pasal 149 RBg. Dalam hal ini dapat digunakan istilah *Lex Specialis Deragot Lex Generali*, sebab perkara tersebut termasuk perkara khusus sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbeda dengan perkara perdata pada umumnya. Sehingga tetap diperlukan pembuktian, karena untuk perkara perceraian yang diverstek bukan hanya ketidakhadiran tergugat saja tetapi pokok perkaranya, yaitu perceraian itu sendiri, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2). Selain itu dalam pasal 134 KHI dan Pasal 22 PP No. 9 Tahun 1975 menyatakan gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut. Dalam pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama juga menyatakan bahwa gugatan perceraian yang didasarkan karena alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> A. Mukti Arto, *Praktek-Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet I, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), halaman 205-206

<sup>13</sup> Wawancara dengan Dra. Hj. Basri'ah Asmopawira, SH., *Hakim Pengadilan Agama Semarang*, Tanggal 19 September 2006

Dalam hukum Islam walaupun tergugat sudah dipanggil secara patut dan resmi oleh pengadilan dua atau tiga kali, ternyata tergugat tetap tidak hadir dalam sidang, maka hakim dalam menjatuhkan putusan secara verstek, terlebih dahulu harus memeriksa bukti-bukti dari Penggugat. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa :

وَلِلْبَيْهَتَيْنِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ : الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ. (متفق عليه)

Artinya : Pembuktian dibebankan kepada penggugat dan sumpah itu dibebankan kepada orang yang meningkari.<sup>14</sup>

Makna dari hadist tersebut dapat dipahami bahwa barang siapa yang mengajukan perkara untuk menuntut haknya maka orang itu harus mampu memberi sumpah dan membuktikan dengan menyertakan alat-alat bukti yang mendukung isi gugatannya.<sup>15</sup>

Selain hadist di atas, hadist lain yang menyatakan pembuktian dalam putusan verstek yaitu, hadist yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib :

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكِ عَنْ خَنْشَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَرْسُلَنِي وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ وَلَا عِلْمُ لِي بِالْقَضَاءِ, فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ سَيَهْدِي قَلْبَكَ وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْحَصْمَانُ فَلَا تَقْضِيَنَّ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخِرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ آخِرُ أَنْ يَتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ, قَالَ : فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا أَوْ مَا أَشْكَكْتُ فِي قَضَاءٍ بَعْدَ.

<sup>14</sup> As-San'any, *Subul As Salam.*, Juz IV, (Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1988), halaman 244

<sup>15</sup> Drs. H. Anshoruddin, S.H., M.A., *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), halaman 35

Artinya : Di riwayatkan oleh Amr bin Auwin beliau berkata : "Saya telah menceritakan kepada Syarik dan Simak dari Khanya, dari Ali r.a., beliau mengatakan : "Saya diutus oleh Rasulullah untuk menjadi qadli di Negara Yaman. Maka saya mengatakan kepada Rasul, wahai Rasul, saya adalah terlalu muda, saya tidak punya keahlian untuk mengadili". Kemudian Rasulullah menjawab : "Sesungguhnya Allah akan memberikan petunjuk pada hatimu dan membenarkan perkataanmu, maka janganlah kamu memutus (perkaranya) sehingga kamu mendengarkan (keterangan pihak lain sebagaimana kamu mendengarkan orang pertama itu sesungguhnya lebih memberikan penjelasan untuk memberikan keputusan". Kemudian Ali r.a. mengatakan : "Maka tidak henti-hentinya saya menghakimi dan tidak ragu untuk memberikan keputusan setelah ini".<sup>16</sup>

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخِرِ فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِ. (رواه احمد وابو داود والترمذي)

Artinya : "Apabila dua orang berperkara kepada engkau, maka janganlah engkau putusan untuk si penggugat selama engkau belum mendengar pembicaraan yang tergugat. Maka kelak engkau mengetahui betapa engkau memutuskannya".<sup>17</sup>

Hadist diatas memberi pengertian bahwa hakim boleh memutuskan hukum terhadap orang yang tidak datang apabila telah cukup keterangan diberikan oleh pihak penggugat. Selain hadist di atas, terdapat pula hadist yang membolehkan putusan verstek yang dijatuhkan tanpa adanya pembuktian yang diriwayatkan Imam Bukhori :

<sup>16</sup> Muhammad Khatabi, *Ma'alim As-Sunan, Syarah Sunan Abu Daud.*, Juz III, (Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1991), halaman 150

<sup>17</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam.*, (Yogyakarta : PT. Al-Ma'arif, 1964), halaman 94



حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ إِنَّ هِنْدًا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَأَحْتَاجُ أَنْ أَخْذَ مِنْ مَالِهِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرِفَةِ). (رواه امام بخارى)

Artinya : Diriwayatkan oleh Muhammad bin Katsir diceritakan oleh Sufyan dari Hisyam dari ayahnya Hisyam dari Aisyah r.a. bahwa Sesungguhnya Hindun berkata kepada nabi Muhammad SAW : "Sesungguhnya Abu Sufyan (Suami Hindun) adalah laki-laki bakhil, aku butuh mengambil dari hartanya (senilai kebutuhan untuk aku dan anakku". Beliau bersabda : "Ambillah apa (hartanya) yang memenuhi kebutuhanmu dan anakmu dengan baik (tidak berlebihan)".<sup>18</sup>

Dari adanya hadist-hadist tersebut, dalam penerapannya di Pengadilan Agama Semarang khususnya dalam perkara perceraian tetap diperlukan pembuktian, apabila hendak dijatuhkan putusan verstek. Karena perkara perceraian merupakan pengecualian terhadap ketentuan HIR dan RBg yang tidak memerlukan pembuktian ketika dijatuhkan putusan verstek, seperti dikemukakan oleh A.Mukti Arto, bahwa putusan verstek dijatuhkan tanpa pembuktian lebih dahulu dalil gugat yang dikemukakan oleh penggugat karena tidak dibantah oleh tergugat, kecuali dalam perkara perceraian, hakim harus membuktikan dalil-dalil gugat (alasan-alasan perceraian), sesuai dengan hukum acara Islam<sup>19</sup>.

Menurut Mukti Arto, penyimpangan tersebut dianggapnya sebagai pemberlakuan terhadap ketentuan khusus yang diatur dalam hukum acara Islam. Beliau menganggap penyimpangan tersebut sebagai kekhususan terhadap

<sup>18</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shohih Bukhori*, Juz 9, (Bairut : Dar Al-Kutub Ilmiyah, 1992), halaman 458

<sup>19</sup> A. Mukti Arto., *Op. Cit.*, halaman 144

ketentuan umum yang khusus yang dimaksud dalam Pasal 54 UU Nomor 7 Tahun 1989 Jo. UU Nomor 3 Tahun 2006. Menurut hemat penulis ketentuan khusus yang dimaksud Pasal 54 diatas adalah ketentuan lain yang diatur dalam hukum positif lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 Jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 yang diantaranya termasuk hukum acara Islam, yang dimaksud hukum acara Islam adalah yang tersebar dalam kitab-kitab fiqh yang merupakan sumber hukum tak tertulis.

Dari beberapa keterangan diatas dan bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa putusan verstek yang didahului pembuktian dibandingkan dengan pertimbangan hukum putusan biasa, maka tidak terdapat perbedaan. Mengingat bahwa amar putusan verstek baik yang mengabulkan ataupun menolak gugatan sangat tergantung pada terbukti dan tidaknya alasan-alasan gugatan dan tidak hanya terletak pada telah terpenuhinya syarat sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR. Sehingga dapat dikatakan bahwa acara verstek pemeriksaan dan pertimbangan hukum dilaksanakan dalam acara biasa, tetapi diputus secara verstek. Dari beberapa uraian diatas pula, apabila diamati dengan melihat kembali bunyi Pasal 125 HIR, tidak terdapat kata-kata "harus", melainkan disana digunakan kalimat "diterima" maka menurut penyusun pasal tersebut memberikan keluasaan pada hakim untuk dapat memutus dengan dasar alat bukti (pembuktian) maupun tanpa alat bukti. Sehingga hakim yang memutus tanpa melalui proses pembuktian tidak dapat dikatakan keliru, demikian pula yang memutus melalui pembuktian juga tidak dapat dikatakan melampui hukum acara. Namun demikian

sepanjang dalam perkara perceraian, penyusun lebih cenderung putusan verstek baru dijatuhkan setelah diadakan pembuktian terhadap alasan-alasan permohonan cerai.

Kecenderungan penyusun tersebut adalah didasarkan pada pertimbangan terhadap terwujudnya keadilan, kebenaran, ketertiban hukum yang mampu memberikan pengayoman pada masyarakat <sup>20</sup>, yang merupakan tujuan dalam penyelenggaraan hukum, dan dampak negatif yang cenderung timbul dari terjadinya perceraian, yang biasanya berupa guncangan psikis yang bukan saja menimpa pada pihak suami isteri yang bercerai tetapi juga pada anak yang terlahir dari perkawinan itu. Dan juga terdapat dalam pernyataan Asy-Syairozi : "Apabila seseorang menghadap hakim dan mengajukan gugatan terhadap yang ghaib, atau tergugat ada ditempat tetapi enggan atau bersembunyi dan kesulitan untuk menghadapkannya (dipengadilan), maka gugatannya tidak dapat diterima kecuali terdapat bukti. Sedang apabila ia mempunyai bukti, maka didengar gugatan dan buktinya. Sebab apabila tidak didengarkan bukti, maka keghaiban (tergugat) dan bersembunyinya, akan dijadikan alasan untuk menggugurkan haknya <sup>21</sup>. Sehingga dengan adanya pembuktian terhadap kebenaran alasan-alasan perceraian tersebut akan relatif lebih memberikan pengayoman terhadap pihak-pihak yang dirugikan.

---

<sup>20</sup> Konsideran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama huruf b

<sup>21</sup> Abi Ishaq Ibrahim Asy-Syairozy, *Al-Muhazab Fi Fiqh Al-Imam Asy-Syafi'i*, Juz II, (Beirut : Darul Fikr, Tanpa Tahun), halaman 303

## **B. Analisis Terhadap Dasar Hukum dalam Perkara Nomor 1132/Pdt.G/2005/PA.Sm**

Pertimbangan hukum merupakan salah satu komponen penting suatu produk badan peradilan. Pertimbangan hukum ada sebagai acuan untuk memberikan kejelasan bagi para pihak yang berperkara tentang putusan yang diambil baik dalam bentuk diterima, ditolak maupun bentuk putusan lainnya.

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim dari pada putusannya terhadap masyarakat, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif. Karena adanya alasan-alasan itulah maka putusan mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya. Betapa pentingnya alasan-alasan sebagai dasar putusan dapat kita lihat dari beberapa putusan Mahkamah Agung yang menetapkan, bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan.<sup>22</sup>

Tentang pertimbangan hukum putusan ini tertuang jelas dalam pasal 178 ayat 1 HIR / Pasal 189 ayat (1) RBg Jo. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.

Pasal 178 ayat (1) HIR :

"Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak".

---

<sup>22</sup> Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., *Op.Cit.*, halaman 15

Pasal 189 ayat (1) RBg :

"Dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak".

Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 :

"Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili".

Pada putusan pengadilan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1132/Pdt.G/2005/Pa.Sm tentang putusan verstek dalam perkara perceraian dengan adanya pembuktian, yang menjadi dasar pertimbangan hukum Pengadilan Agama Semarang dalam menyelesaikan perkara ini antara lain <sup>23</sup> :

1. Menimbang bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak mengirimkan kuasa sebagai wakilnya, sehingga usaha perdamaian tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu perkara ini dapat diputuskan tanpa hadirnya tergugat secara verstek (Pasal 125 HIR)
2. Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yaitu : Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena tergugat sudah 1 tahun lebih pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberikan nafkah wajib, baik lahir maupun batin dan tidak pernah kembali.

---

<sup>23</sup> Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1132/Pdt.G/2005/Pa.Sm, halaman 5

3. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak angka 2 dan 4.
4. Menimbang bahwa oleh karena itu harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat alasan perceraian sesuai dengan pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam,

Dari dasar hukum inilah yang menjadi kunci pokok yang digunakan Pengadilan Agama Semarang dalam menghasilkan putusannya.

Pengadilan Agama Semarang dalam memutuskan perkara perceraian secara verstek tersebut mengacu pada dasar hukum positif. Dalam hal ini berdasarkan Pasal 125 HIR yang berbunyi :

*“Jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan hukum”.*<sup>24</sup>

Poin diatas merupakan syarat yang kurang kuat apabila putusan verstek dalam perkara perceraian tetap dilakukan pembuktian. Seharusnya ditambah lagi dengan dasar hukum dari kitab-kitab fiqh yang menjadi sumber hukum tidak tertulis yang dianut Pengadilan Agama yang menyatakan adanya pembuktian dalam putusan verstek, seperti disertakannya dalil dibawah ini sebagai dasar pertimbangan hukum :

---

<sup>24</sup> R. Soesilo, *RIB / HIR, Dengan Penjelasan*, (Bogor : Politeia, 1985), halaman 83

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخِرِ فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي. (رواه احمد وابو داود والترمذي)

Artinya : "Apabila dua orang berperkara kepada engkau, maka janganlah engkau putuskan untuk si penggugat selama engkau belum mendengar pembicaraan yang tergugat. Maka kelak engkau mengetahui betapa engkau memutuskannya.<sup>25</sup>

وَلِلْبَيْهَقِيِّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ : الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ. (متفق عليه)

Artinya : Pembuktian dibebankan kepada penggugat dan sumpah itu dibebankan kepada orang yang mengingkari.<sup>26</sup>

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا تَقَا ضَيَّ إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِأَوَّلٍ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخِرِ فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي, قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدَ. (رواه احمد وابو داود والترمذي, وحسنه وقواه ابن المديني, وصحيحه ابن حبان)

Artinya : "Dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata. Rasulullah SAW telah bersabda. Apabila dua pihak meminta kepadamu keadilan maka janganlah engkau memutus kepadamu keadilan maka janganlah engkau memutus hanya dengan mendengarkan keterangan satu pihak saja sehingga engkau mendengarkan keterangan pihak lainnya. Dengan demikian engkau akan mengetahui bagaimana seharusnya memutus. Ali berkata, tetaplah saya sebagai hakim sesudah itu. (HR. Ahmad, Abu Daud, Tarmizy dan dihasankan dan dikuatkan oleh Ibn Al-Madiny dan dishahihkan oleh Ibn Hibban)<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op. Cit.*, halaman 94

<sup>26</sup> As-San'any, *Op. Cit.*, halaman 224

<sup>27</sup> *Ibid.*, halaman 223

Dengan demikian dari adanya hadist diatas dapat dipahami apabila ketentuan tersebut dijadikan dasar pertimbangan putusan verstek, maka sangat sesuai dengan dasar pertimbangan hukum yang mengharuskan adanya pembuktian dalam perkara perceraian yang diputus secara verstek. Karena dalam Pasal 125 HIR tidak terdapat kejelasan tentang adanya pembuktian dalam putusan verstek. Pasal 125 HIR hanya mengatur diperbolehkannya hakim memutuskan perkara terhadap orang yang tidak hadir setelah melihat apakah gugatan penggugat melawan hak atau tidak beralasan.

Setelah mempelajari proses persidangan dan data-data yang telah penulis peroleh atas kasus ini maka yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Semarang dalam menyelesaikan perkara perceraian secara verstek dengan adanya pembuktian, menurut penulis tidak sependapat dengan dasar hukumnya, karena putusannya hanya didasarkan pada Pasal 125 HIR yang secara teoritik tidak memerlukan pembuktian dalam putusan verstek. Kelemahan masih nampak majelis hakim tidak mencantumkan dasar pertimbangan hukum dari hukum acara Islam, yaitu yang tersebar dalam kitab-kitab fiqh yang menyatakan diperbolehkannya memutus perkara terhadap orang yang tidak hadir dengan didahulukan pembuktian terlebih dahulu.



**C. Analaisis Terhadap Alasan Hakim Menjatuhkan Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian Nomor 1132/Pdt.G/2005/PA.Sm Pada Hari Pertama Persidangan ?**

Kelemahan lain dalam perkara nomor 1132/Pdt.G/2005/PA.Sm tampak ketika pada sidang pertama tergugat tidak hadir meskipun dipanggil dengan patut. Supaya memperoleh keyakinan yang mantap mengenai kebenaran dalil gugatan, hakim berpendapat perlu lebih dahulu mendengar keterangan saksi-saksi. Pada hari itu, penggugat sudah siap dengan alat bukti tertulis dan saksi-saksi yang diperlukan, sehingga setelah didengarkan keterangan saksi-saksi, hakim langsung memutuskan acara verstek dengan amar mengabulkan. Alasan Hakim menjatuhkan putusan verstek dalam sidang pertama berdasarkan jabatan atau *ex officio*, meskipun tidak ada permintaan dari pihak penggugat, selain itu pasal 125 HIR / 149 RBg yang dijadikan dasar pertimbangan hukum perkara nomor 1132/Pdt.G/2005/PA.Sm juga memperbolehkan menjatuhkan putusan verstek dalam sidang pertama <sup>28</sup>. Permasalahan seperti ini, sangat bertolak belakang dari ketentuan Pasal 126 HIR yang berbunyi :

"Di dalam hal yang tersebut pada kedua pasal diatas tadi, Pengadilan Negeri dapat sebelum menjatuhkan keputusan memerintahkan supaya pihak yang tidak datang dipanggil buat kedua kalinya datang menghadap pada hari persidangan lain, yang diberitahukan oleh ketua di dalam persidangan kepada pihak yang datang, bagi siapa pemberitahuan itu berlaku sebagai panggilan". <sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Dra. Hj. Basri'ah Asmopawira, SH., *Hakim Pengadilan Agama Semarang*

<sup>29</sup> R. Soesilo, *Op. Cit.*, halaman 84

Keterangan pasal diatas ini memberikan suatu kelonggaran, yaitu dalam hal-hal tersebut dalam pasal-pasal 124 dan 125 hakim tidak wajib segera mengambil keputusan seperti tersebut diatas itu, akan tetapi dapat memerintahkan agar supaya pihak yang tidak datang itu dipanggil sekali lagi supaya menghadap. Apabila pada panggilan yang ke dua kalinya ini juga mereka itu tetap tidak menghadap atau menyuruh wakilnya untuk menghadap, maka barulah diambil keputusan seperti yang tersebut dalam pasal-pasal 124 dan 125 di atas.

Pasal 126 HIR ini juga memberi peringatan agar hakim jangan sampai bertindak dengan tergesa-gesa. Kemungkinan tetap ada bahwa pemanggilan untuk menghadap barangkali secara formil telah disampaikan dengan patut, akan tetapi mungkin sesungguhnya orang yang dipanggil itu tidak mengetahui tentang pemanggilan itu. Ini bukan mustahil, oleh karena menurut ketentuan surat panggilan itu dijalankan oleh juru sita, ia tidak bertemu sendiri dengan orang yang dipanggil, akan tetapi menyerahkan panggilan itu kepada kepala desa dan kepala desa itu lalai untuk menyampaikannya, lebih-lebih kalau diingat, bahwa karena banyaknya pekerjaan di balai desa itu biasanya semrawut <sup>30</sup>.

Penerapan seperti itu dapat dianggap bercorak anarkis dan sewenang-wenang terhadap Tergugat. Bahkan penerapan seperti itu bertentangan dengan asas impersialitas dan perlakuan yang sama. Tindakan tergesa-gesa tersebut dapat

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Dra. Hj. Basri'ah Asmopawira, SH., *Hakim Pengadilan Agama Semarang*

ditafsirkan sebagai perlakuan keperpihakan kepada Penggugat pada satu sisi, dan mengabaikan kepentingan Tergugat pada sisi lain.

Memperhatikan permasalahan diatas, menurut penulis perlu ditegakkan batasan yang bersifat toleran berdasarkan kelayakan yang beradab dan manusiawi, dalam kerangka melindungi kepentingan kedua belah pihak yang berperkara. Berdasarkan kelayakan tersebut, batas toleransi pemanggilan yang dapat dibenarkan hukum dan moral adalah minimal dua kali dan maksimal tiga kali. Dengan demikian apabila pengunduran dan pemanggilan sudah sampai tiga kali, tetapi tergugat tidak datang menghadiri sidang tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk menghadap dipersidangan, maka hakim wajib menjatuhkan putusan verstek. Bertitik tolak dari dasar pertimbangan hukum yang digariskan Pasal 126 HIR, hakim yang tidak berani menerapkan acara verstek dalam kasus yang demikian, dianggap tidak peka menjawab panggilan rasa keadilan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Setelah penulis menyelesaikan pembahasan studi kasus tentang perkara perceraian yang diputus secara verstek dengan didahului pembuktian di Pengadilan Agama Semarang, dari hasil penelitian yang penulis lakukan maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara perceraian yang diputus secara verstek dengan perkara nomor 1132/Pdt.G/2005/Pa.Sm tetap diperlukan pembuktian, apabila hendak dijatuhkan putusan verstek. Berdasarkan analisis penulis, hal ini dapat diterapkan asas *Lex Specialis Deragot Lex Generali*, yaitu undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum. Oleh karena itu, perkara ini merupakan pengecualian terhadap ketentuan HIR atau RBg, karena dengan adanya pembuktian dapat menghindari terjadinya perceraian atas dasar persekongkolan antara suami isteri dan melaksanakan asas undang-undang perkawinan, yaitu mempersulit perceraian. Kecenderungan penyusun tersebut juga didasarkan pada pertimbangan terhadap terwujudnya keadilan, kebenaran dan ketertiban hukum yang mampu memberikan pengayoman pada masyarakat <sup>1</sup>,

---

<sup>1</sup> Konsideran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama huruf b

2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara nomor 1132/Pdt.G/2005/PA.Sm tentang cerai gugat yang diputus secara verstek lebih menitikberatkan pada aspek hukum positif saja, yaitu mendasarkan putusan pada Pasal 125 HIR. Ternyata dalam pasal 125 HIR yang dijadikan dasar pertimbangan hakim tersebut apabila diamati dengan melihat kembali bunyi Pasal 125 HIR, tidak terdapat kata-kata "harus", melainkan disana digunakan kalimat "diterima" maka menurut penyusun pasal tersebut memberikan keluasaan pada hakim untuk dapat memutus dengan dasar alat bukti (pembuktian) maupun tanpa alat bukti. Sehingga hakim yang memutus tanpa melalui proses pembuktian tidak dapat dikatakan keliru, demikian pula yang memutus melalui pembuktian juga tidak dapat dikatakan melampui hukum acara.
3. Majelis Hakim dalam memutuskan perkara nomor 1132/Pdt.G/2005/PA.Sm yang diputus secara verstek dalam sidang pertama berdasarkan jabatan atau *ex officio*, meskipun tidak ada permintaan dari pihak penggugat, selain itu pasal 125 HIR / 149 RBg yang dijadikan dasar pertimbangan hukum perkara nomor 1132/Pdt.G/2005/PA.Sm juga memperbolehkan menjatuhkan putusan verstek dalam sidang pertama.

## **B. SARAN-SARAN**

Dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam putusan nomor 1132/Pdt.G/2005/PA hanya dicantumkan secara

gamblang saja, tanpa menyebutkan secara rinci dari hukum Islam yang dijadikan sebagai pertimbangan hukum. Hal ini tentu akan membuka kemungkinan ketidakjelasan pemahaman orang yang membacanya yang notabennya adalah beragama Islam. Alangkah lebih baik kalau dasar hukum tersebut dicantumkan secara jelas, tegas dan terukur. Karena sebuah putusan pada saat ini, mungkin akan dijadikan sebagai tolok ukur hakim-hakim di kemudian hari, dan juga akan menjadi bahan kajian bagi para pelajar. Sehingga kepada hakim Pengadilan Agama saya menyarankan agar dalam menjatuhkan sebuah putusan itu hendaknya harus selalu waspada dan jangan tergesa-gesa, serta mengambil dasar hukum dari hukum positif dan hukum Islam, karena dasar hukum yang digunakan harus dua macam yaitu hukum positif dan hukum Islam yang diambil dari Al-Qur'an dan hadits, maupun qaul fuqaha, agar putusan yang dihasilkan merupakan suatu putusan yang jelas, tegas, adil dan benar.

Kepada ilmuwan saya menyarankan agar jangan terburu-buru menarik kesimpulan bahwa sebuah putusan itu selalu benar, dengan hanya karena adanya unsur yang sama di dalamnya. Karena di setiap tempat, keadilan itu akan berbeda bentuk aplikasi nilainya.

### **C. PENTUTUP**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan taufiq-Nya, atas diberikannya kekuatan fisik dan mental pada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Walaupun penulis telah berusaha semaksimal mungkin, namun karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis, maka karya ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharap saran-saran dan kritik yang konstruktif, demi kesempurnaan tulisan ini.

Akhirnya penulis berharap bagaimanapun bentuknya tulisan ini, semoga dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya. Dan teriring segala puji bagi Allah SWT dan shalawat serta salam atas rasul-Nya, semoga kita selalu dalam bimbingan, lindungan, dan ridla-Nya. *Amin ya rabbal 'alamin*

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Rasyid, Roihan., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. 10, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)
- Anshoruddin., *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005)
- Arikunto, Suharsini., *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan dan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, Cet. XI, 1997)
- Arto, A. Mukti., *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet. I, 1996)
- Ash-Shiddieqy, Hasbi ., *Peradilan dan Hukum Acara Islam.*, (Yogyakarta : PT. Al-Ma'arif, 1964)
- As-San'any, *Subul As Salam.*, Juz IV, (Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1988)
- Asy-Syairozy, Abi Ishaq Ibrahim., *Al-Muhazab Fi Fiqh Al-Imam Asy-Syafi'i*, Juz II, (Beirut : Darul Fikr, Tanpa Tahun)
- Berita Acara Persidangan*, Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1132/Pdt.G/2005/Pa.Sm
- Departemen Agama, *Himpunan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Departemen Agama Republik Indonesia, 2001)
- \_\_\_\_\_, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1996)
- Hamzah, Andi ., *Kamus Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia)
- Harahap, M. Yahya., *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005)
- J. Moeloeng, Lexy., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2004)
- Khatabi, Muhammad., *Ma'alim As-Sunan*, Syarah Sunan Abu Daud., Juz III, (Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1991)
- Manan, Abdul., *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Yayasan Al-Hikmah, 2001)
- Mertokusumo, Sudikno., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi VI, (Yogyakarta : Liberty, 2002)
- Muhadjir, Noeng., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rake Sarasin, 1989)
- Muhammad, Abi Abdillah bin Ismail Al-Bukhori, Shohih Bukhori, Juz 9, (Bairut : Dar Al-Kutub Ilmiyah, 1992)



- Muhammad, Abdul Kadir., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992)
- Prodjodikoro, Wirjono., *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Bandung : Bale, 1988)
- Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1132/Pdt.G/2005/Pa.Sm
- Samudera, Teguh., *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Cet. I, (Bandung : Alumni, 1992)
- Sasangka, Hari., *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, (Bandung : Mandar Maju, 2005)
- SEMA Nomor 9 Tahun 1964 Tanggal 13 April 1964
- Soepomo, R., *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1993)
- Subekti., *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Bina Cipta, 1977)
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pembuktian*, Cet. III (Jakarta : Pradnya Paramita, 1975)
- Suparmono, Gatot., *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Cet. I, (Bandung : Alumni, 1993)
- Sutantio, Retnowulan., dan Oeraipkartawinata, Iskandar., *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : Mandar Maju, 1989)
- Soekanto, Soerjono., *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986)
- Soesilo, R., *RIB / HIR, Dengan Penjelasan*, (Bogor : Politeia, 1985)
- Syahrani, Riduan., *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Cet. II, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000)
- Termorshuizen, Marianne., *Kamus Hukum Belanda Indonesia*, (Jakarta : Djambatan, 1999)
- Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, (Jakarta : Sinar Grafika, Cet. I, 2004)
- Undang-Undang Peradilan Agama*, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, (Jakarta : Sinar Grafika, Cet. I, 2004)
- Wawancara dengan Drs. Dardiri., Panitera Muda Pengadilan Agama Semarang tanggal 8 Mei 2006
- Wawancara dengan. Asmopawira, Basri'ah., *Hakim Pengadilan Agama Semarang*, Tanggal 19 September 2006
- Yahya, Muhtar dan Rahman, Fatchur., *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami*, (Bandung : PT. Al-Ma'arif)